



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN





**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN**

31 DESEMBER 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Jalan Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen Telepon: (0287) 381245
Faksimile: (0287) 381245 e-mail: dlhkp.kebumen@gmail.com
Website: www.dlhkp.kebumenkab.go.id Kode Pos: 54351

Kebumen, 30 Januari 2024

Kepada

Yth. : Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kebumen
di –
KEBUMEN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 050 / 1.487

No	Jenis Surat	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (JKjIP) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	1 (satu) buku	Dikirim dengan hormat, untuk guna seperlunya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 199311 1 001

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabid		
Kasi / Kasubbag Perikanan		30/1-2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan laporan ini telah diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Untuk itu kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan, pengkajian dan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 disampaikan, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Kebumen, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ASEP NURDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 1993111 001

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Kabid		
Kasi / Kasubbag Perikanan		30/12/2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
2.1. Gambaran Umum Organisasi	1
2.2. Fungsi Strategis Organisasi.....	3
2.3. Permasalahan Utama yang dihadapi.....	3
1.2.1 Urusan Lingkungan Hidup.....	3
1.2.2 Urusan Kelautan dan Perikanan.....	8
2.4. Landasan Hukum :	9
2.5. Sistematika Penyajian LKJIP	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Perencanaan Strategis	16
2.1.1 Rencana Strategis.....	16
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Sasaran 1, “ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”	22
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU Daerah).....	22
2. Indeks Kualitas Air (IKA).....	28
3. Indeks Kualitas Udara (IKU).....	33
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	35

5. Indeks Respon Lingkungan Hidup.....	36
3.1.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan”.....	37
1. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan.....	37
2. Nilai Produksi Perikanan Budidaya.....	43
3. Nilai Produksi Perikanan Tangkap.....	47
4. Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam.	51
3.2. Realisasi Anggaran dan Efisiensi	56
BAB IV PENUTUP.....	66
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja dan Permasalah/Kendala	66
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja.	70
LAMPIRAN 1 : REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023	72
LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA.....	80
LAMPIRAN 3 : PENGHARGAAN.....	84
LAMPIRAN 4 : TABEL KINERJA TAHUN 2023	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
Tabel 2. 3	Target Indikator Sasaran Strategis Tahun 2019-2023	18
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 2. 5	Anggaran Tahun 2023.....	19
Tabel 3. 1	Skala Ordinal dan Kategori Capaian	21
Tabel 3. 2	IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2023	22
Tabel 3. 3	Capaian IKLH Tahun 2023 dengan tiga variabel	23
Tabel 3. 4	Target, Realisasi dan Capaian IKLH 5 (lima) tahun terakhir	23
Tabel 3. 5	Tingkat kemajuan IKLH 2023	24
Tabel 3. 6	Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Kebumen tahun 2023 terhadap Provinsi dan Nasional	25
Tabel 3. 7	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	26
Tabel 3. 8	Perhitungan Pij (Status Mutu Air) Periode II Tahun 2023	29
Tabel 3. 9	Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen	31
Tabel 3. 10	Capaian indeks kualitas air tahun 2023.....	31
Tabel 3. 11	Indeks Kualitas Udara tahun 2023.....	33
Tabel 3. 12	Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023	35
Tabel 3. 13	Persentase Pemenuhan Data Dukung Indeks Respon Lingkungan Hidup Kab. Kebumen Tahun 2023	37
Tabel 3. 14	Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	37
Tabel 3. 15	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2023	38
Tabel 3. 16	Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.....	39
Tabel 3. 17	Kemajuan Capaian Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	40
Tabel 3. 18	Faktor Pendorong Keberhasilan, Kendala dan Solusi IKU Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	41
Tabel 3. 19	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	43
Tabel 3. 20	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Pada Akhir Target Renstra.....	45

Tabel 3. 21	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023	47
Tabel 3. 22	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2023.....	49
Tabel 3. 23	Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 Terhadap Akhir Target Renstra.....	49
Tabel 3. 24	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan Tahun 2023	51
Tabel 3. 25	Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Hasil Pengolahan Perikanan dan Garam (Ton) Tahun 2023 Terhadap Akhir Target Renstra	53
Tabel 3. 26	Realisasi Anggaran dan Efisiensi Belanja Tahun 2023.....	56
Tabel 3. 27	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	61
Tabel 4. 1	Capaian, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat serta Solusi dalam Pencapaian Target Indikator Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023.....	66
Tabel 4. 2	Tabel Capaian, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat serta Solusi Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2023	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1	Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023.....	23
Grafik 3. 2	Target dan Realisasi IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023.	24
Grafik 3. 3	Realisasi IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023	25
Grafik 3. 4	Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023	31
Grafik 3. 5	Capaian IKA Kabupaten Kebumen dibandingkan Provinsi dan Nasional.....	32
Grafik 3. 6	Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023.....	34
Grafik 3. 7	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional.....	34
Grafik 3. 8	Target dan Reallisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2023.....	35
Grafik 3. 9	Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional selama 5 tahun terakhir	36
Grafik 3. 10	Target dan Realisasi Kinerja urusan Kelautan Perikanan Tahun 2023. 39	
Grafik 3. 11	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023.....	40
Grafik 3. 12	Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Budidaya tahun 2019 – 2023	44
Grafik 3. 13	Realisasi Kinerja Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Tahun 2023.....	44
Grafik 3. 14	Target dan Realisasi produksi perikanan Budidaya tahun 2019 – 2023	45
Grafik 3. 15	Target dan Realisasi Nilai Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sampai dengan tahun 2023	48
Grafik 3. 16	Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Tangkap tahun 2019 – 2023.....	48

Grafik 4. 2	Target dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023 ..66
Grafik 4. 3	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023.....68

-

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Topografi Kabupaten Kebumen.....	5
---	---

BAB I PENDAHULUAN

2.1. Gambaran Umum Organisasi

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen secara umum dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kelautan dan perikanan dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;

- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - 2. Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Subkoordinator Pengelolaan Persampahan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Subkoordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Subkoordinator Pelestarian Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Pengelolaan dan Pembinaan Pembudidayaan Ikan;
 - 2. Subkoordinator Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan; dan
 - 3. Subkoordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya
- f. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - 1. Subkoordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - 2. Subkoordinator Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan di Perairan Umum Daratan; dan
 - 3. Subkoordinator Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tangkap.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Fungsi Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kehutanan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, kehutanan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

1.2.1 Urusan Lingkungan Hidup

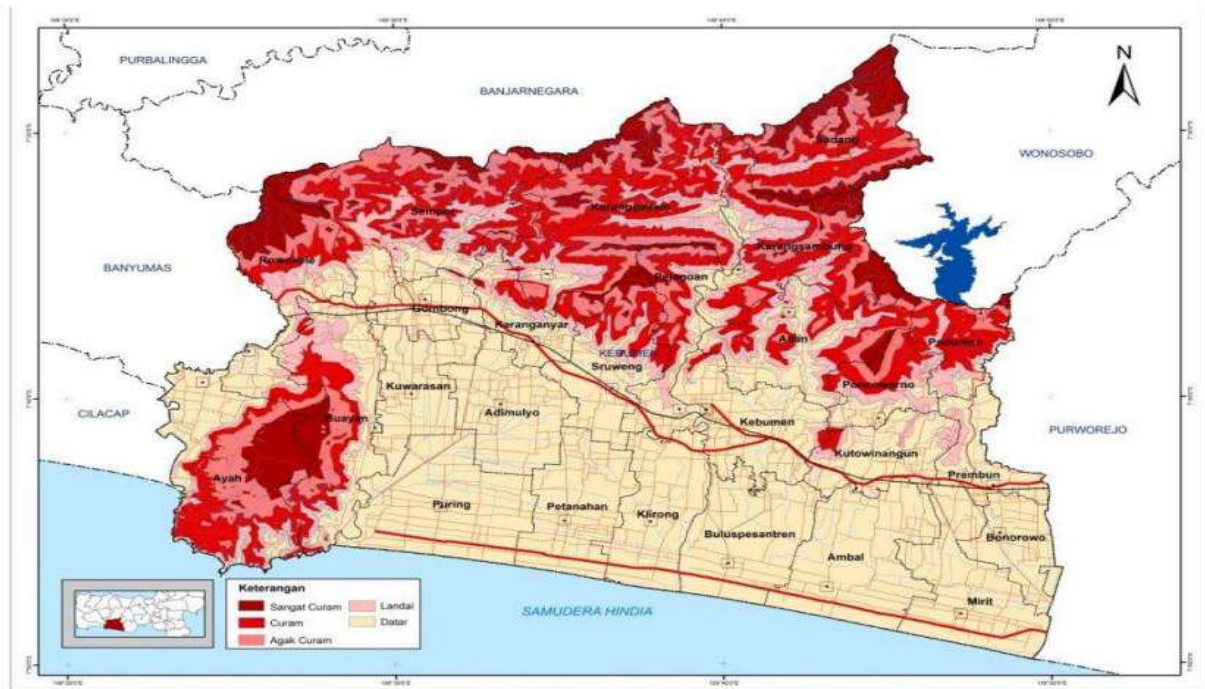
Permasalahan utama atau isu-isu strategis yang terjadi pada urusan lingkungan hidup adalah;

- 3.2.1.1 Masih kurangnya kajian tentang keanekaragaman hayati.
- 3.2.1.2 Belum optimalnya daya angkut sampah dan penanganan yang tidak terpusat di satu instansi saja sehingga data tidak terpusat.
- 3.2.1.3 Perlu peningkatan koordinasi antara Instansi, stakeholder terkait dengan konservasi penanaman bibit penyangga abrasi di pesisir pantai selatan, sehingga masih banyak penebangan tanaman konservasi untuk kegiatan usaha.

- 3.2.1.4 Perlunya koordinasi, rehabilitasi dan pengetatan sekitar aliran sungai untuk mencegah erosi akibat lekukan sungai, penebangan pohon atau aktifitas penambangan disekitar Daerah Aliran Sungai.
- 3.2.1.5 Capaian luas RTH perkotaan belum optimal perlu penyesuaian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten dan provinsi serta belum terpenuhinya ketersediaan 30% Ruang Terbuka Hijau terkait Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengawasan penyediaan RTH minimal untuk para pengembang perumahan atau kegiatan usaha.
- 3.2.1.6 Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah domestik, limbah rumah tangga maupun limbah industri berbahaya.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2023 adalah sebanyak 1.426.832 jiwa. Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 Hektar atau 1.281,115 Km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Kabupaten Kebumen terletak di provinsi Jawa Tengah yang meliputi pegunungan dibagian utara dan sebagian sebelah barat serta dataran rendah di bagian selatan. Adapun Batas Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Wonosobo, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Berikut adalah peta Kabupaten kebumen yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kebumen, Peta Revisi RTRW, 2019

Gambar 1. 1 Peta Topografi Kabupaten Kebumen

Adapun isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan potensi bencana yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen antara lain :

1. Angin Ribut

Wilayah yang rentan bencana Angin Ribut adalah ;

Sebagian Kecamatan Ambal, Kebumen, Kutowinangun, Bulus Pesantren, Petanahan, Adimulyo, Pejagoan dan sebagian kecil kecamatan Gombong.

2. Rawan Banjir

Wilayah yang rentan bencana Banjir adalah ; Sebagian Kecamatan Gombong, Ayah, Karanganyar, Puring, Kuwarasan, Buayan, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.

3. Rawan Gempa

Wilayah yang rentan bencana Gempa adalah ; Sebagian Kecamatan Karangsambung, Alian, Sadang, Karanggayam, Sempor dan Rowokele.

4. Rawan Kekeringan

Wilayah yang rentan bencana Kekeringan adalah ; Sebagian Kecamatan Padurso, Poncowarno, Alian, Pejagoan dan Karanggayam.

5. Rawan Tsunami

Wilayah yang rentan bencana Tsunami adalah ; Sebagian Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring dan Ayah.

6. Rawan Tanah Longsor

Wilayah yang rentan bencana Longsor adalah ; Sebagian Kecamatan Ayah, Rowokele, Sempor, Gombong, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Karanggayam, Pejagoan, Alian, Karangsembung, Sadang, Padureso dan Poncowarno.

Yang mana apabila hal tersebut diatas tidak ditangani dan segera dilakukan pencegahan, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang serius di Kabupaten Kebumen.

Kemudian Isu-isu penting mengenai Indikator kinerja di bidang Lingkungan Hidup yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh berbagai faktor;
 - Prosentase Cakupan pelayanan sampah sangat dipengaruhi oleh banyaknya sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sangat tergantung dengan besarnya persentase APBD dalam pengelolaan sampah untuk memenuhi kriteria keikutsertaan Lomba Adipura.

Maka diperlukan pengoptimalan Armada (truck sampah dan armroll), Penambahan TPS dan Armada baru di wilayah diluar perkotaan, meningkatkan retribusi pelayanan sampah dengan menambah jumlah pelanggan, meningkatkan kemudahan pembayaran retribusi, Memperpanjang umur TPA dan kegiatan pemilahan sampah untuk dimanfaatkan kembali dan Peningkatan kesejahteraan pekerja. Kegiatan Pengurangan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) harus tetap diagalakkan melalui pembentukan bank sampah dan TPS3R, namun untuk pembentukan TPS3R harus ada kerjasama dengan pihak Desa atau Kecamatan dalam penyediaan lahan dan Anggaran APBD yang terbatas.

- Kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau peningkatan Keanekaragaman Hayati sangat dipengaruhi oleh; banyaknya lahan yang bisa dikelola oleh pihak Kabupaten untuk pengelolaan serta pengoptimalan Keanekaragaman Hayati, Inventarisasi luasan RTH Kabupaten Kebumen selalu diperbarui, Kerjasama kemitraan dengan swasta dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) dan lainnya
- Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengajak partisipasi masyarakat dalam menjaga Lingkungan Hidup. Maka diperlukan peningkatan jumlah

personel dalam kegiatan penghargaan lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat yang peduli lingkungan untuk studi banding ke berbagai tempat/ instansi terkait serta mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah. Selain itu pendekatan untuk mencapai keberhasilan kegiatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan dilakukan dengan kemasan yang menarik bagi partisipan.

- Kegiatan pengawasan dan perijinan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh jumlah usaha yang diawasi dan kesadaran masyarakat tentang administrasi lingkungan hidup yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan usaha. Maka diperlukan wadah khusus pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan melalui smart city atau pelaporan bersifat online dan sosialisasi perijinan lingkungan hidup dengan pengoptimalan sosialisasi melalui reklame, poster, website, atau menyantulkannya di aplikasi perijinan.
- Pengendalian pencemaran lingkungan merupakan Program yang masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah terdiri dari Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Pemulihan Pencemaran. Kegiatan *Pencegahan Pencemaran* sangat diperlukan kesadaran masyarakat maka diperlukan sosialisasi bahaya pencemaran dan fasilitasi pengaduan sedini mungkin terhadap pencemaran yang ada. Kegiatan *Pengendalian Pencemaran* sangat dipengaruhi oleh keakuratan data yang dihasilkan dalam menguji Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Vegetasi Tutupan Lahan maka diperlukan pendataan berulang dan pelaporan secara online agar dapat memberikan penanganan yang tepat sasaran dari Instansi terkait. Kegiatan *Pemulihan Pencemaran* meliputi Restorasi, Rehabilitasi serta Penghentian Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup. Restorasi dapat dilakukan dengan mengembalikan luasan fungsi lahan yang sudah terkena alih fungsi lahan atau dengan meminimalkan resiko terjadinya bencana di daerah tersebut. Kegiatan Rehabilitasi dapat dilakukan terhadap lahan yang kritis. Serta Penghentian Sumber Pencemaran dapat dilakukan rutin setiap tahun terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Kegiatan Penanganan Limbah B3 sangat dipengaruhi oleh penanganan serta pengelolaan terhadap Limbah B3 kabupaten/kota. Maka diperlukan

peningkatan pengawasan dan pelayanan penyimpanan sementara terhadap Limbah Berbahaya yang berpotensi mencemari Lingkungan.

1.2.2 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan yang dihadapi dan hampir menjadi permasalahan setiap tahun antara lain adalah sebagai berikut :

- 1.2.2.1 Belum tercukupinya kebutuhan benih di seluruh kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Kebumen; hal ini dilihat dari masih banyaknya bibit ikan yang masuk ke Kabupaten Kebumen, antara lain bibit ikan lele dari Banjarnegara dan bibit ikan gurami dari Purworejo yang dikarenakan kurang optimalnya operasional baik Balai Benih Ikan (BBI) karena masih dalam tahap renovasi maupun Unit Perbenihan Rakyat (UPR) yang ada di Kabupaten Kebumen.
- 1.2.2.2 Kurangnya UPR yang bersertifikat sehingga belum menjamin mutu benih ikan yang dihasilkan.
- 1.2.2.3 Jumlah produksi perikanan, khususnya perikanan tangkap di laut (yang dilakukan oleh para nelayan), sangat tergantung sekali dari faktor alam/musim, siklus 5-6 tahunan, penurunan produksi ikan yang di darat, namun demikian tahun ini jumlah produksi mencapai target tetapi target PAD tidak tercapai. Hal ini dikarenakan ikan hasil tangkapan memiliki nilai ekonomis yang rendah, serta jumlah trip melaut rendah, sehingga produksi perikanan tangkap sulit mengalami peningkatan yang signifikan. Perlunya upaya pembangunan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang memungkinkan untuk melaut dalam cuaca tidak mendukung sehingga meningkatkan keselamatan nelayan.
- 1.2.2.4 Kapasitas kapal (GT) masih kecil sehingga nelayan hanya bisa melakukan operasional secara one day fishing yang berada dijalur satu sehingga hasilnya kurang maksimal.
- 1.2.2.5 Para pembudidaya kebanyakan juga masih menggunakan sistem tradisional karena terbatasnya modal usaha.
- 1.2.2.6 Masih rendahnya angka konsumsi makan ikan tingkat Kabupaten, sebesar 17,49 jika dibandingkan dengan provinsi yang sudah mencapai angka 37,22 kg/ka/th apalagi tingkat nasional yang sudah mencapai angka 55,16 kg/ka/th.

1.2.2.7 Masih sedikitnya jumlah kelompok masyarakat pengawas yang ada, sampai dengan tahun 2023 baru terbentuk sebanyak 37 kelompok dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas) walaupun ada potensi di daerah tersebut.

2.4. Landasan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 196);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 207);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 208);
 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 124 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen;

33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen tahun 2024;

2.5. Sistematika Penyajian LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- COVER
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR GRAFIK
- DAFTAR DIAGRAM

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis Organisasi

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalah/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Terpilih yaitu “ Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat ”.

Dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan mengacu pada *Misi ke-3 dan ke-4* sebagai berikut:

1. Urusan Lingkungan Hidup, secara umum mengacu pada *Misi ke-4* yaitu “Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.
2. Urusan Kelautan dan Perikanan, mengacu pada *Misi ke-3* yaitu “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Poin	74,19	<ul style="list-style-type: none">• Termasuk IKU daerah;• Terdiri dari 3 parameter (Indeks Kualitas Air, Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan);• Dalam rangka melaksanakan Perda RPPLH

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar rupiah	5.657,88	<ul style="list-style-type: none"> PDRB dari sektor Kelautan dan Perikanan Salah satu sumber data urusan daerah dalam perhitungan PDRB
		Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	4,50	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan realisasi peningkatan nilai produksi usaha kelautan perikanan (PDRB sektor kelautan dan perikanan) Target RPJMD 2021-2026, dengan data dasar tahun 2020 (dalam rupiah/ peningkatan nilai produksi)

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Poin	74,19
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar rupiah	5.657,88

		Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	4,50
--	--	--	--	---	------

1. Urusan Lingkungan Hidup :

Indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” (IKU Daerah).

Adapun indikator pendukung IKU Urusan Lingkungan Hidup antara lain :

- 1.1. Indeks Kualitas Udara
- 1.2. Indeks Kualitas Air
- 1.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

2. Urusan Kelautan dan Perikanan :

Indikator “ Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan” (IKU Urusan)

Adapun indikator pendukung IKU Urusan Kelautan dan Perikanan lainnya antara lain :

- 2.1. Nilai Produksi Perikanan Budidaya
- 2.2. Nilai Produksi Perikanan tangkap
- 2.3. Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam Kabupaten Kebumen

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target indikator kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Target Indikator Sasaran Strategis Tahun 2019-2023

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Poin	74,75	76,00	74,01	17,10	74,19
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar rupiah			5.657,88	5.657,88	5.657,88

		Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%			2,00	3,00	4,50
--	--	--	--	---	--	--	------	------	------

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Poin	74,19	74,19
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer		PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar rupiah	5.657,88	5.657,88
		Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	4,50	4,50
	Meningkatnya tata kelola administrasi penunjang urusan pemerintah	Meningkatnya Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85

Tabel 2. 5 Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET.
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	342.358.000	342.358.000	APBD Kab
2	Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	1.091.750.400	1.263.719.400	APBD Kab
3	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	2.070.952.600	2.374.753.600	APBD Kab

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET.
4	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)	38.531.000	38.531.000	APBD Kab
5	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/PPLH	65.243.000	69.055.000	APBD Kab
6	Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	82.043.000	82.043.000	APBD Kab
7	Program penghargaan lingkungan hidup	46.656.000	46.656.000	APBD Kab
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	16.464.000	16.464.000	APBD Kab
9	Program Pengelolaan Sampah	9.727.892.000	9.779.565.000	APBD Kab
10	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	12.958.337.000	12.730.556.000	APBD Kab
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.775.793.000	2.852.649.000	APBD Kab
12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.713.941.000	3.092.215.000	APBD Kab
13	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan	53.456.000	53.456.000	APBD Kab
14	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	387.464.000	383.464.000	APBD Kab
	Jumlah Anggaran	32.370.881.000	33.125.485.000	APBD Kab

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala Pengukuran Ordinal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 1 Skala Ordinal dan Kategori Capaian

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023, mencakup dua sasaran strategis yaitu :

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- (2) Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan

Secara rinci capaian kinerja tahun 2023 untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran 1, “ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU Daerah).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai informasi awal dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan standar perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra 2021-2026 mencakup tiga variable yaitu angka Indeks Kualitas Udara dan angka Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Formulasi perhitungan capaian kinerja IKLH sebagai berikut :

$$(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) \\ + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan})$$

Adapun capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2 IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Poin	74,19	67,16	90,52 %	Baik	<ul style="list-style-type: none">• Laporan IKLH DLHKP Kab. Kebumen 2023• Ekspose IKLH DLHK Provinsi Jateng• Ekspose IKLH Kementerian KLHK

Perhitungan IKLH tahun 2023 menggunakan tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Air realisasi sebesar 51,74, Indeks Kualitas Udara sebesar 90,41 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 50,63.

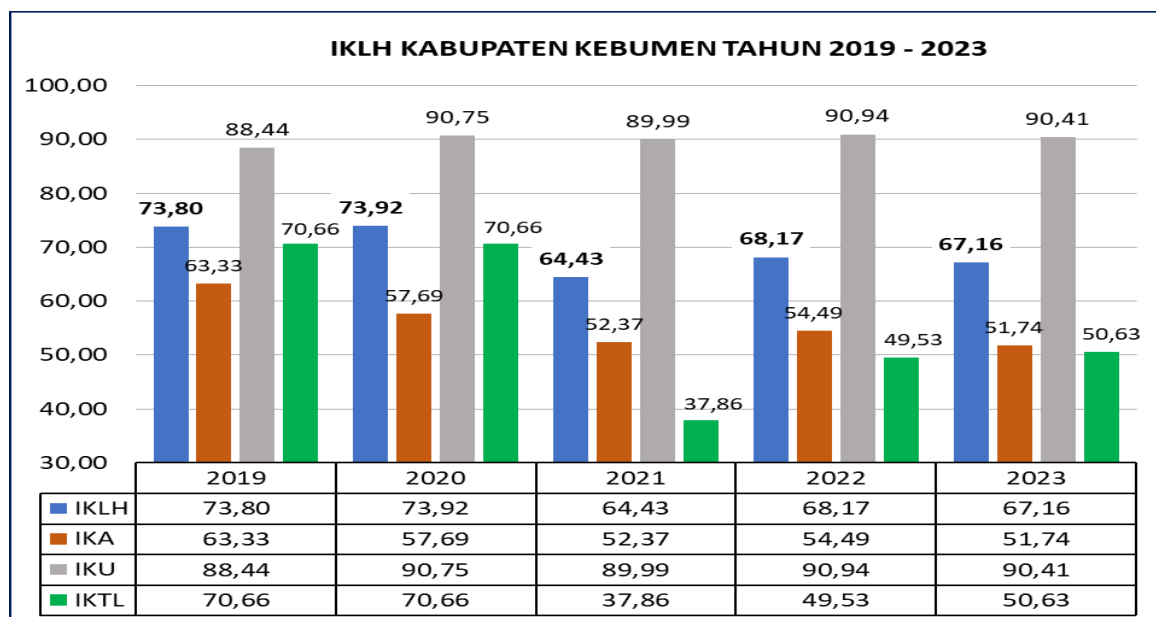
Tabel 3. 3 Capaian IKLH Tahun 2023 dengan tiga variabel

VARIABEL	INDEKS	Koef. pengali	HASIL
Indeks Kuaslitas Air	51,74	0,376	19,45
Indeks Kualitas Udara	90,41	0,405	36,62
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50,63	0,219	11,09
IKLH			67,16

Adapun Predikat IKLH adalah sebagai berikut :

- < 40 = waspada
- 40 - 50 = sangat kurang
- 50 - 60 = kurang baik
- 60 – 70 = cukup baik
- 70 – 80 = baik
- > 80 = sangat baik

Hasil capaian IKLH selama 5 tahun terakhir kami sajikan pada grafik di bawah ini:



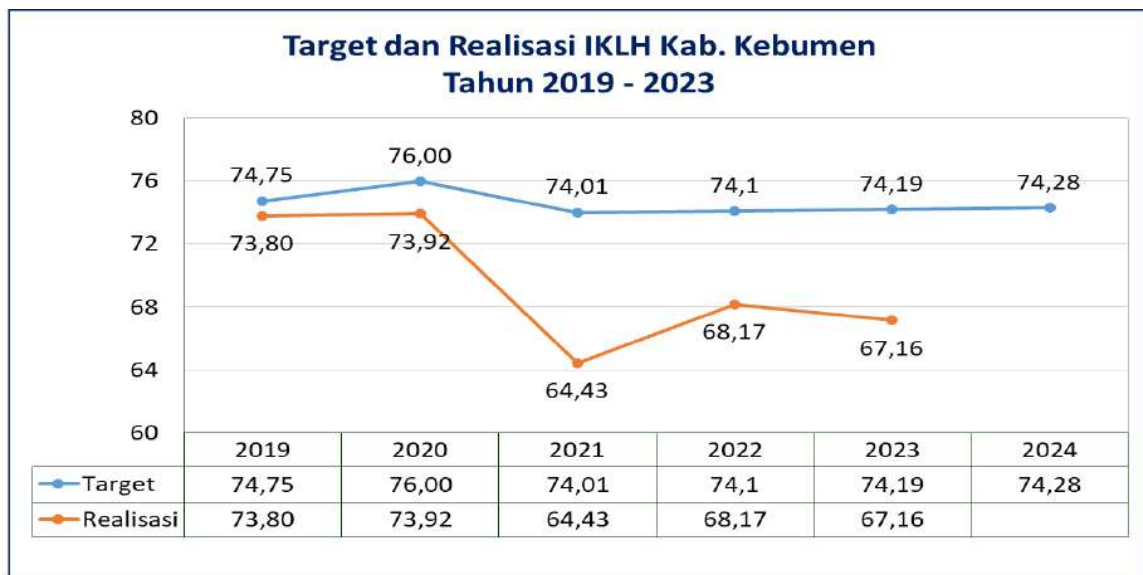
Grafik 3. 1 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

Target, Realisasi dan Capaian IKLH 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada matriks dibawah ini :

Tabel 3. 4 Target, Realisasi dan Capaian IKLH 5 (lima) tahun terakhir

Tujuan/ Sasaran	Indikator	2019			2020			2021			2022			2023		
		Tar- get	Reali- sasi	Capai- an	Tar- get	Reali- sasi	Capai- an	Tar- get	Reali- sasi	Capai- an	Tar- get	Reali- sasi	Capai- an	Tar- get	Reali- sasi	Capai- an
Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		73,80	98,72%		73,92		64,43		87,05%		91,99%		67,16		90,52%
Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		74,75		76,00		74,01		74,10		74,19						

Target dan Realisasi IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Grafik 3. 2 Target dan Realisasi IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023

Sedangkan tingkat kemajuan IKLH terhadap capaian yang ditargetkan pada akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 5 Tingkat kemajuan IKLH 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=(4/5*100)$
1.	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,16	74,45	90,21%
	Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				

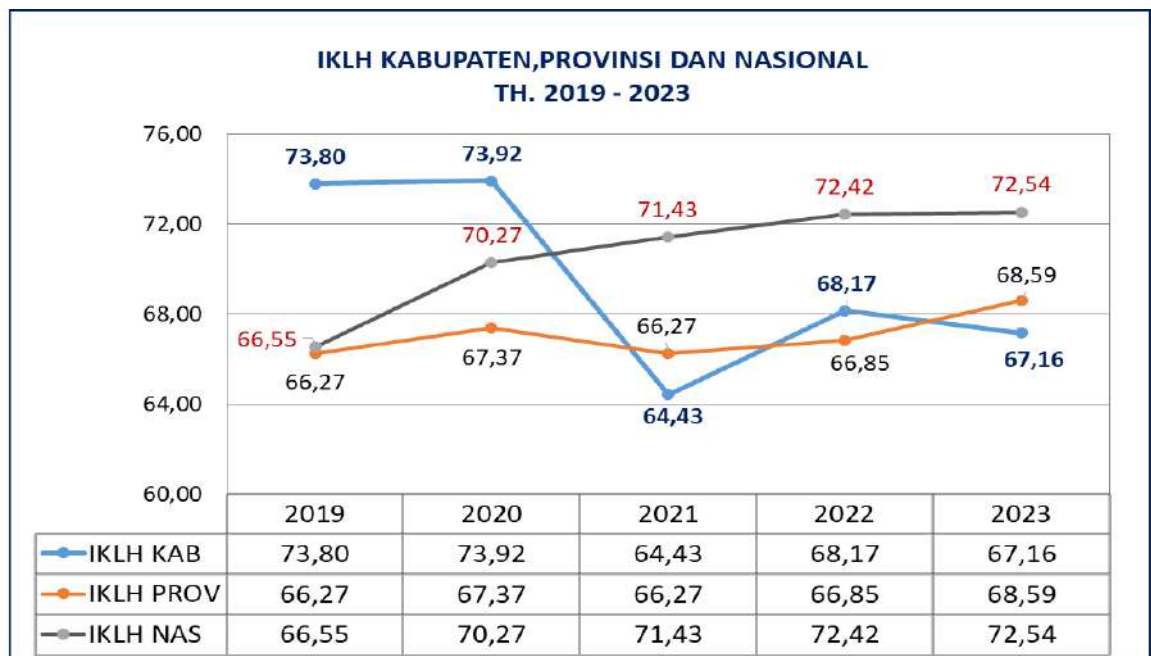
Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Kebumen tahun

2023 Jika dibandingkan dengan Realisasi Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab. Kebumen tahun 2023 terhadap Provinsi dan Nasional

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Realisasi Kab. Kebumen 2023	Realisasi Provinsi dan Nasional 2023		Capaian (%)	
				Provinsi	Nasional	Capaian terhadap provinsi	Capaian Terhadap Nasional
1	2	3	4	5	6	$7=4/5*100$	$8=4/6*100$
1.	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,16	68,59	72,54	97,91%	92,58%

Pada lima tahun terakhir, realisasi kinerja IKLH Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3. 3 Realisasi IKLH Kabupaten, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Capaian IKLH Kabupaten Kebumen selalu di atas/lebih besar dari pada capaian IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan Pada tahun 2021, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Provinsi maupun Nasional karena faktor IKTL yang menurun drastis. Namun demikian hasil perolehan IKLH Kabupen Kebumen tahun 2021 sebesar 64,43 atau masuk kategori **“CUKUP BAIK”**.

Tahun 2022 capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Nasional namun masih diatas capaian IKLH Provinsi yaitu sebesar 68,17 dan masih termasuk kategori **“CUKUP BAIK”**.

Tahun 2023 capaian IKLH Kabupaten Kebumen turun dibawah capaian Nasional dan IKLH Provinsi yaitu sebesar 67,16 dan masih termasuk kategori **“CUKUP BAIK”**. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan metode laporan IKLH sejak tahun 2021 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi online dari kementerian LHK. Dari hasil pengujian tahun 2023 melalui aplikasi online tersebut terdapat penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU).

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi terhadap realisasi dan target IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,19	67,16	90,52%
Faktor Pendorong yang dapat mendukung tercapainya target kinerja					
1.	Menurunkan tingkat pencemaran air (Limbah rumah tangga maupun industri);				
2.	Menurunnya tingkat ODF (Open Defecation Free) atau Bebas buang air besar yang dapat mencemari sungai;				
3.	Pengurangan penebangan pohon dan memperbanyak penanaman pohon;				
4.	Mengurangi Emisi dari kendaraan bermotor dengan memperbanyak angkutan masal, melakukan uji kendaraan secara menyeluruh, beralih ke kendaraan listrik atau sepeda dan memperbanyak bicycle path;				
5.	Memperbanyak penanaman jenis pohon ayoman jalan yang dapat mengurangi emisi karbon;				
6.	Memperbanyak Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik-Terpusat pada permukiman padat penduduk;				

7.	Upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH;
8.	Penanganan yang cepat terhadap pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
9.	Penyusunan peraturan desa tentang lingkungan hidup, terutama pada daerah yang terdapat lahan kritis dan awan bencana;
10.	Meningkatkan akuntabilitas Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup melalui inventarisasi data yang kredibel sehingga pengambilan keputusan lebih tepat dan efektif untuk menurunkan tingkat pencemaran; dan
11.	Perbaikan metode pengambilan data/ pengujian, menjaga standarisasi ISO/ SNI, memperbanyak titik sample, pemilihan penyedia yang profesional dalam segi metodologi, peralatan maupun tingkat pengalamannya dalam hal konsultasi Lingkungan Hidup.
Faktor Penghambat atau kendala yang dihadapi di tahun 2023	
1.	Adanya pertambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
2.	Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan
3.	Penentuan target IKLH belum akuntabel dengan penyediaan anggaran yang seharusnya disiapkan dalam rencana pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau target dalam Perda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka panjang.
4.	Terbatasnya waktu, anggaran dan prasarana (maps yang belum update) dalam inventarisasi luasan Tutupan Lahan untuk perhitungan IKLH setiap tahunnya
Solusi yang dilakukan pada tahun 2023	
1.	Sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap masyarakat, perihal pengendalian pencemaran lingkungan serta program konservasi sumberdaya alam. Hal ini sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik;
2.	Adanya demplot/percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan "model" pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran;
3.	Upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH
4.	Melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan "sak uwong selawe wit sak lawase urip" dan pelaksanaan program unggulan Bupati Kebumen "Nandur Wit Nggo Anak Putu";
5.	Fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Restorasi;
6.	Pelatihan dan Sosialisasi terhadap industri kecil;
7.	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan
8.	Inventarisasi mandiri Luasan RTH Kabupaten Kebumen, Luasan Tutupan Lahan Kabupaten Kebumen tahun 2023.

Penurunan nilai IKA cukup signifikan pada tahun 2023 karena dari hasil input data yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, dari total 118 data hanya 76 data yang terverifikasi yang berasal dari data waduk/embung karena kurangnya parameter pokok IKA. Serta Adanya musim kemarau panjang akibat El Nino dan jumlah kegiatan yang menjadi sumber pencemar semakin banyak menyebabkan nilai IKA turun.

Luasan tutupan lahan masih belum selesai input dalam aplikasi IKLH dan sebagian besar tidak terverifikasi karena kurangnya peta yang terbaru, keterbatasan waktu, sumber daya manusia dan anggaran untuk pembaharuan/inventarisasi tutupan lahan dan RTH Kabupaten Kebumen untuk kepentingan perhitungan IKLH yang update setiap tahun.

Selain itu adanya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) pada Indikator Nasional dan Provinsi sedangkan Kabupaten/ kota tidak ada komponen IKAL dalam perhitungan IKLH sehingga jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain masih relevan namun jika dibandingkan dengan IKLH Provinsi dan Nasional jadi tidak relevan. Selain itu, yaitu adanya perbedaan target IKLH setiap Kabupaten/ Kota yang sangat tergantung Peraturan Daerah masing-masing dalam menentukan target IKLH, sehingga terdapat dua jenis capaian yaitu capaian terhadap Target IKLH dan Capaian IKLH itu sendiri yang keduanya memiliki kategori atau rentang masing-masing.

Pada tahun 2023 indikator ini didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.263.719.400,- dan realisasi Rp. 1.247.652.807 dengan perserapan anggaran (98,73 %). Seluruh target kinerja program/ kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,27 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks kualitas air sungai dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Total Fosfat*, *Total Coli* dan *Fecal Coli*. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform tidak dimasukkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang rutin diukur meliputi sungai lukulo dan wawar, di lokasi hulu dan hilir selama musim kemarau dan penghujan.

Keberadaan air terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Formulasi penghitungan angka Indeks Kualitas Air dengan formulasi sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$$

- IP_j = Pencemaran bagi peruntukan (j)
 IP_j = (C_i/L_{ij}, C₂/L_{2j},...)
- C_i = Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
 L_{ij} = Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)
 $(C_i/L_{ij})_{Maksimum}$ = Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
 $(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}$ = nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}

Nilai	Keterangan	Bobot Indeks
$0 \leq IP \leq 1,0$	Memenuhi baku mutu	70
$1,0 < IP \leq 5,0$	Tercemar ringan	50
$5,0 < IP \leq 10,0$	Tercemar sedang	30
$IP > 10,0$	Tercemar berat	10

Indeks kualitas air tahun Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 8 Perhitungan Pij (Status Mutu Air) Periode II Tahun 2023

No	Titik Pantau	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Parameter Uji								Pij	Status Mutu Air
				pH	TSS	DO	BOD	COD	T-Fosphat	Nitrat	Fecal Coli		
				(mg/l)									
1	2	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Sungai Kedungbener	Jatisari	Kebumen	8,11	14,8	4,24	48,6	86,84	0,0528	5,9	30	5,05	Cemar Sedang
2	Sungai Semali	Semali	Karangsambung	8,31	18,2	4,4197	12,9	32,33	0,0367	3	60	4,15	Cemar Ringan
3	Sungai Luk Ulo tengah	Kutosari	Kebumen	8,44	14	7,06	3,32	21,36	0,126	7,3	50	4,36	Cemar Ringan
4	Sungai Jatinegara hulu	Donosari	Sempor	7,18	2,67	5,5396	7,2	20,7	0,05	1,6	10	2,50	Cemar Ringan
5	Embung Penimbun	Penimbun	Karanggayam	7,92	10,6	4,1997	8	26,73	0,042	3,7	30	3,11	Cemar Ringan
6	Waduk Sempor	Sempor	Sempor	7,41	8,5	6,4596	10,2	36,19	0,0596	2,8	40	3,05	Cemar Ringan
7	Sungai Luk Ulo Hilir	Ayam putih	Buluspesanten	8,26	14,25	7,08	3,44	20,84	0,1025	6,2	80	3,29	Cemar Ringan
8	Sungai Jatinegara Hilir	Tambakmulyo	Puring	8,14	27	6,32	15,1	54,55	0,1266	3,2	50	4,39	Cemar Ringan
9	Sungai Jatinegara Tengah	Jatinegara	Sempor	7,26	3,75	2,24	9,75	18,66	0,0518	1,8	20	2,77	Cemar Ringan
10	Sungai Kethek	Candi	Karanganyar	8,04	14,5	7,06	4,7	28,27	0,0536	1,2	20	2,75	Cemar Ringan
11	Sungai Keceme	Mrinen	Kutowinangun	7,6	6	4,19	11,8	41,43	0,0298	3,4	20	3,18	Cemar Ringan
12	Sungai Wawar Tengah	Tersobo	Prembun	7,67	8,4	5,28	19	91,91	0,0429	4,5	30	3,92	Cemar Ringan
13	Sungai Wawar Hilir	Wiromartan	Mirit	8,06	92,5	5,84	9,9	50,22	0,036	7,5	90	4,63	Cemar Ringan
14	Sungai Pucang	Patukgawemulyo	Mirit	7,72	17,6	5,58	5,7	36,92	0,036	3,7	20	2,92	Cemar Ringan
15	Sungai Wawar Hulu	Padureso	Sendangdalem	8,15	3,6	8,29	11,9	60,29	0,0491	7,9	20	3,98	Cemar Ringan
16	Bendung Pejengkolan	Pejengkolan	Padureso	8,15	4,4	4,36	19,6	74,82	0,0576	6,2	80	4,45	Cemar Ringan
17	Waduk Wadaslintang	Sendangdalem	Padureso	7,83	5,4	5,59	7,32	25,17	0,0826	5,2	50	3,09	Cemar Ringan
18	Embung Cangkring	Cangkring	Sadang	8,43	10	6,18	21,15	71,65	0,0273	5,4	50	6,55	Cemar Ringan
19	Sungai Luk Ulo Hulu	Seboro	Sadang	8,75	13,6	5,24	9,7	24,77	0,0137	3,4	30	2,85	cemar Sedang
20	Intake Kedungsamak	Kemungguhan	Alian	7,88	22,4	6,86	6,25	19,96	0,0431	3,8	50	3,39	Cemar Ringan
22	Sungai Kemit	Grenggeng	Karanganyar	7,91	11,2	6,02	12,7	39,44	0,0291	3,3	20	3,10	Cemar Ringan
23	Sungai Karanganyar	Karanganyar	Karanganyar	7,4	16,8	5,82	10,80	34,70	0,0297	2,7	50	7,04	Cemar Sedang

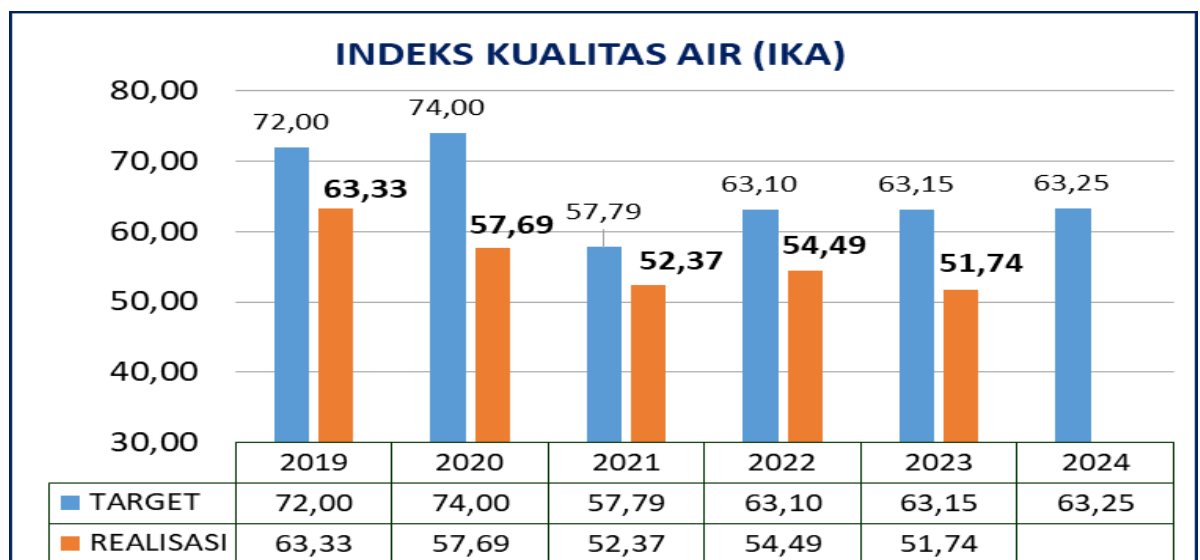
Tabel 3. 9 Perhitungan Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen

Mutu Air	Jumlah Pemantau yang memenuhi mutu air	Persentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
Memenuhi	6	13,04	70	9,13
Cemar Ringan	38	82,60	50	41,30
Cemar Sedang	2	4,34	30	1,30
Cemar Berat	0	0	10	0
Total	46		NILAI IKA	51,74

Tabel 3. 10 Capaian indeks kualitas air tahun 2023

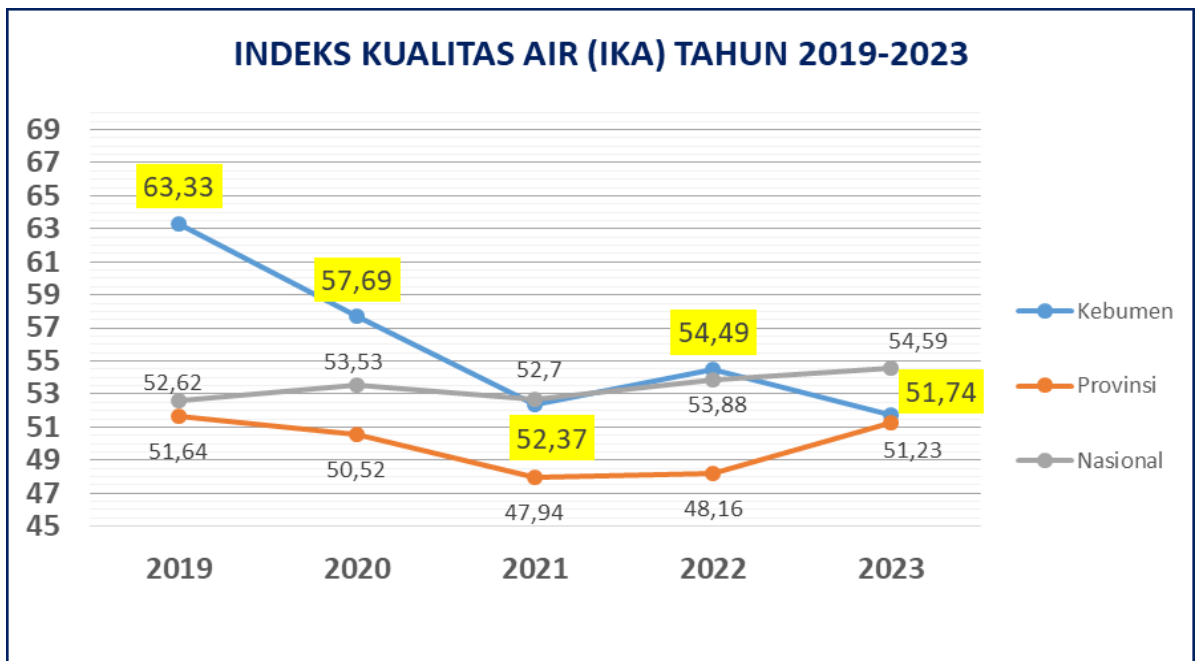
No.	Indikator kinerja	Satuan	Capaian sd 2022	2023			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Air	Point/ indeks	54,49	63,15	51,74	81,93	63,37

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen diketahui bahwa beberapa parameter di atas baku mutu. Capaian indeks kualitas air Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023 sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3. 4 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

Berikut ini adalah realisasi Indeks Kualitas Air Kab. Kebumen, Provinsi dan Nasional selama 5 tahun terakhir



Grafik 3.5 Capaian IKA Kabupaten Kebumen dibandingkan Provinsi dan Nasional

Capaian Indeks Kualitas Air tahun 2023 tidak sesuai dengan target, hal tersebut terutama disebabkan masih terjadi pencemaran air, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kualitas air sungai, diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestik, adanya budaya buang air besar sembarangan dan adanya pembuangan limbah industri kecil. Serta Adanya musim kemarau panjang akibat El Nino dan jumlah kegiatan yang menjadi sumber pencemar semakin banyak menyebabkan nilai IKA turun.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana instalasi pengolahan air limbah industri, pelayanan pengelolaan air limbah domestic (sedot tinja), dan sosialisasi serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung indikator ini yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.263.719.400,- dan realisasi Rp. 1.247.652.807 dengan perserapan anggaran (98,73 %). Seluruh target kinerja program/ kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,27 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Angka Indeks Kualitas Udara dipergunakan untuk menjelaskan/ menginformasikan perubahan-perubahan kualitas udara suatu perkotaan. Formulasi penghitungan indeks kualitas udara berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO₂ dan NO₂, dengan formulasi sebagai berikut :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{20,9} (I_{EU} - 0,1)\right)$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu Eu}}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu Eu}}$$

Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka

- Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi
- Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi

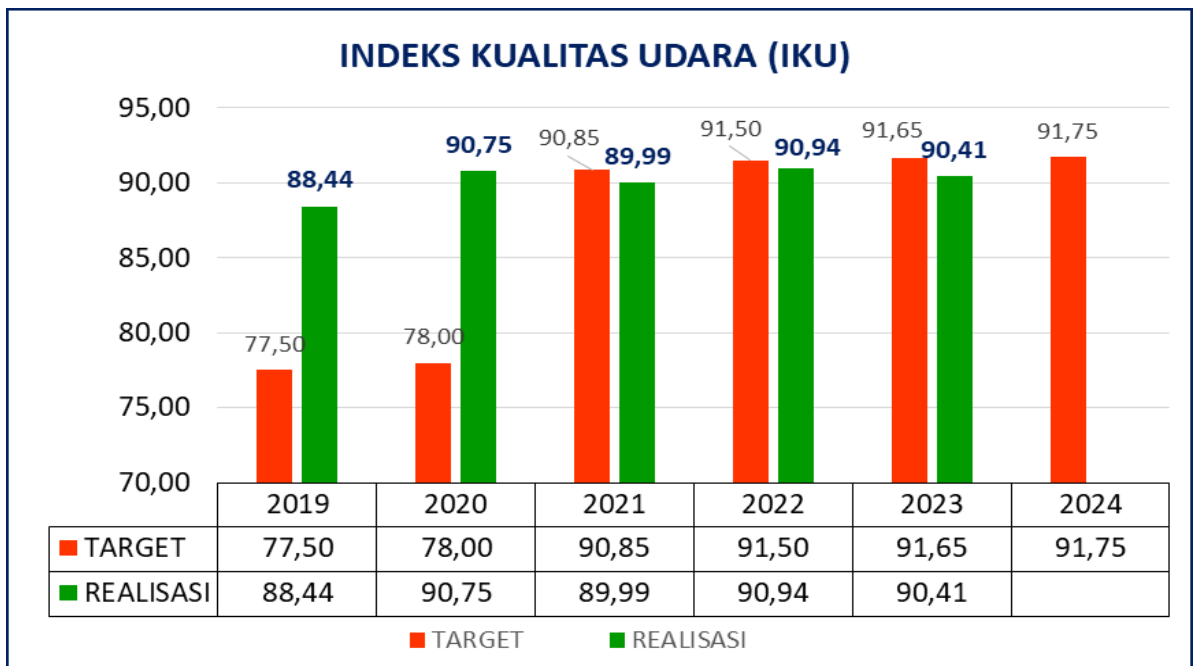
Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 11 Indeks Kualitas Udara tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Capaian sd 2022	2023			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Udara	Point/ indeks	90,94	91,65	90,41	98,65	92,00

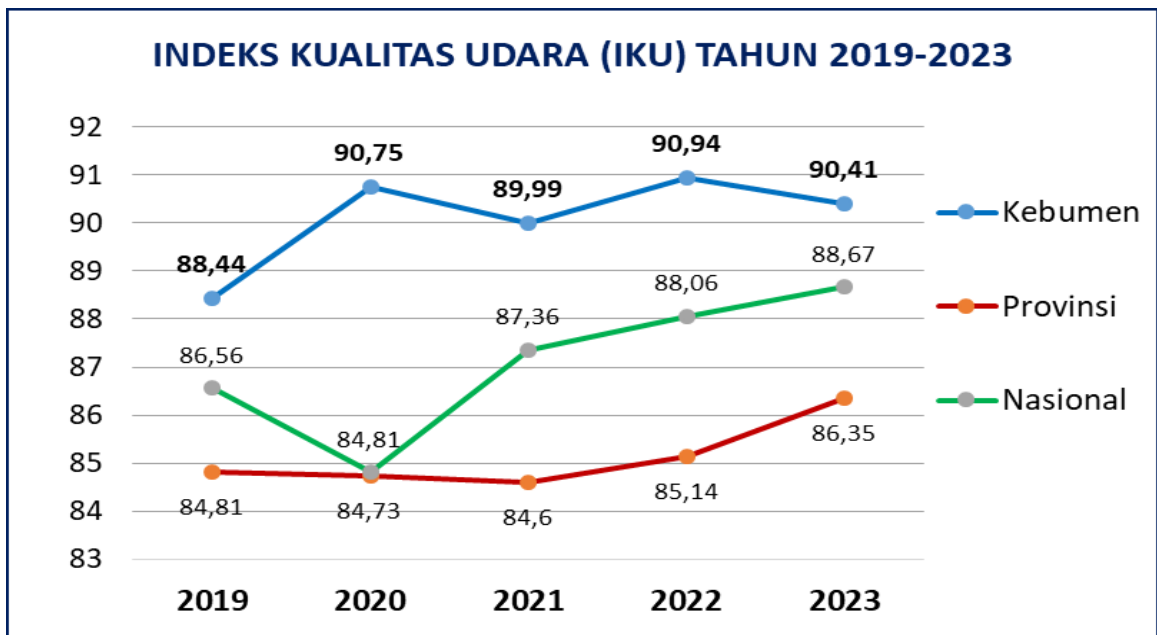
Angka indek tersebut menunjukkan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek negative bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang sensitive dan nilai estetika.

Adapun Realisasi Indeks Kualitas Udara Kab. Kebumen selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.6 *Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen Tahun 2019 - 2023*

Perbandingan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir dengan capaian diatas nasional maupun provinsi Jawa Tengah, sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.7 *Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional*

Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung indikator ini yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.263.719.400,- dan realisasi Rp. 1.247.652.807 dengan perserapan anggaran (98,73 %). Seluruh target kinerja program/ kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 1,27 % merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

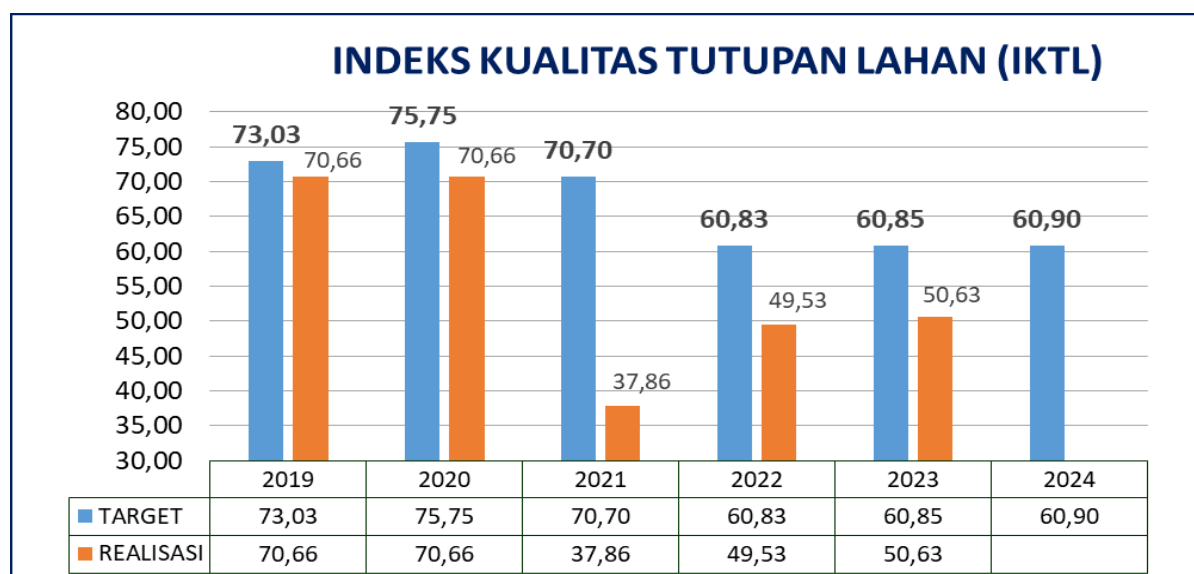
Penghitungan IKTL dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

Tabel 3. 12 Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023

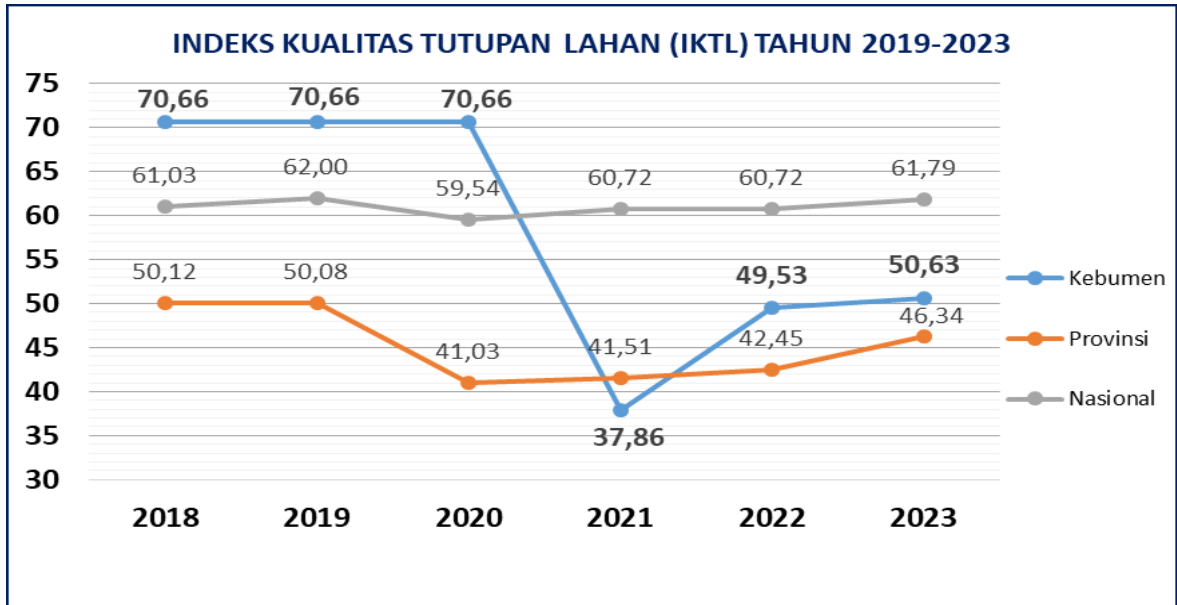
No	Indikator kinerja	Satuan	Capaian s.d 2022	2023			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point/ indeks	90,94	91,65	90,41	98,65	92,00

Adapun realisasi dan target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3. 8 Target dan Reallisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2023

Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3. 9 Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional selama 5 tahun terakhir

5. Indeks Respon Lingkungan Hidup

Sejak tahun 2020 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Setiap tahun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh rapor yang di dalamnya berisi tentang angka indeks, tolok ukur posisi daerah tersebut dalam wilayah provinsi dan nasional, indeks respon dan rekomendasi untuk perbaikan masing masing indeks. Informasi ini selain akan disampaikan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai salah satu faktor perhitungan dana bagi hasil daerah, juga kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk evaluasi kinerja lingkungan Pemerintah Daerah.

Rapor tersebut juga akan diberikan kepada Pemerintah Daerah, dengan

tujuan memperkuat posisi dinas yang membidangi sektor lingkungan hidup dan kehutanan untuk bernegosiasi dengan gubernur, bupati atau walikota, serta lembaga legislatif daerah pada saat penyusunan anggaran.

Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib mengisi beberapa parameter Indeks Respon pada aplikasi IKLH sejak tahun 2023, adapun rapor pengisian Indeks Respon Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2023 yang berisi tiga parameter yaitu Langit Biru, Kali Bersih dan Indonesia Hijau.

Adapun pemenuhan terhadap indikator dari ketiga parameter diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 13 Persentase Pemenuhan Data Dukung Indeks Respon Lingkungan Hidup Kab. Kebumen Tahun 2023

No.	Parameter	% Pemenuhan Data Dukung ke Aplikasi IKLH
1.	Langit Biru	96%
2.	Kali Bersih	90%
3.	Indonesia Hijau	100%
4.	Gambut Lestari	-

3.1.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan”.

1. Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan

Tujuan dan Sasaran Kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 14 Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Tujuan: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Milyar Rupiah	5.657,88	363,94	6,43%	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan Target Gabungan beberapa OPD/Urusan (Bappeda Kab. Kebumen) DLHKP Kab. Kebumen 2023
Sasaran: Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	4,5	8,97	199,42%	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> Laporan DLHKP Kab. Kebumen 2023 Pengukuran Kinerja DLHKP Kab. Kebumen 2023

Rumus :

$$\text{Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan} = \frac{(\text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun } (n) \text{ dalam rupiah} - \text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun 2020 dalam rupiah})}{\text{nilai produksi kelautan dan perikanan tahun 2020 dalam rupiah}} \times 100\%$$

Data Kinerja Sasaran Strategis Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen Tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3. 15 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Perikanan Tangkap (Rp)	Perikanan Budidaya (Rp)	Pengolahan Hasil Perikanan (Rp)	Garam (Rp)	Nilai Produksi (Rp) *	Realisasi (%)	Target Rens-tra (%)	Capaian (%)	Ket.
1	2019	208.409.454.306	117.603.172.000	10.141.695.000	244.860.000	336.399.181.306	94,26	0	0	
2	2020	196.258.500.419	130.669.387.000	6.464.341.000	578.480.000	333.970.708.419	92,85	0	0	
3	2021	212.457.910.669	135.191.978.000	29.218.550.300	623780000	377.492.218.969	13,03	2,50	521,26	Data dasar Th. 2020
4	2022	173.982.608.774	138.501.573.000	37.715.056.339	599757500	350.798.995.613	5,04	3,00	167,96	Data dasar Th. 2020
5	2023	174.876.849.000	152.416.467.300	34.490.000.000	417.000.000	362.200.316.300	8,97	4,50	199,4	Data dasar Th. 2020

Dari tabel diatas kita memperoleh angka realisasi Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan adalah :

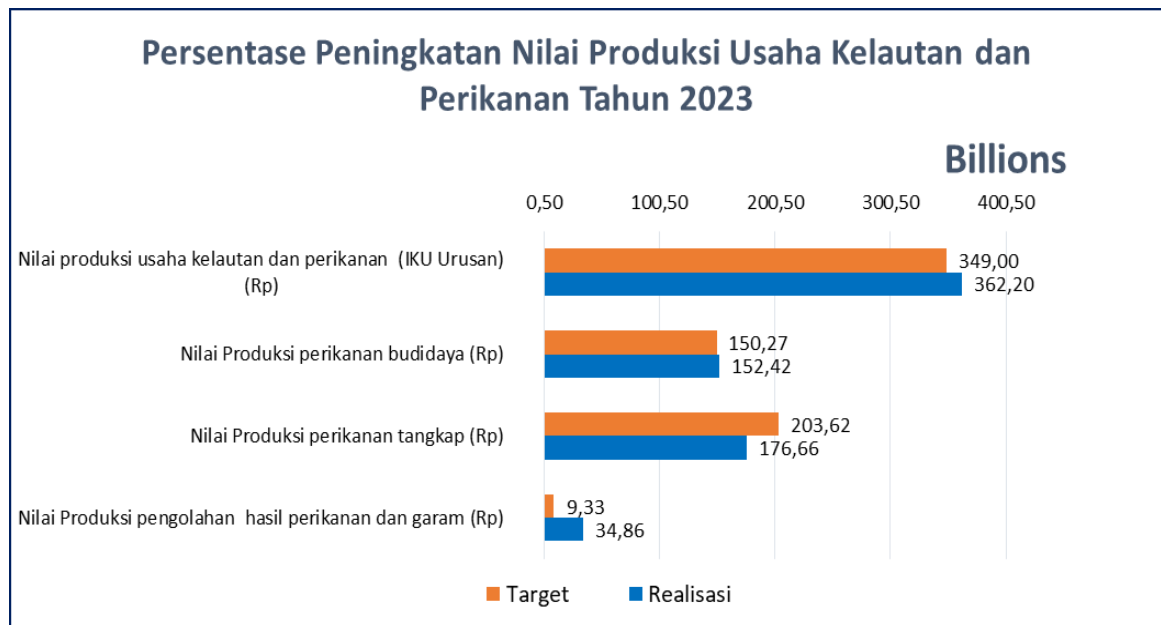
$$\text{Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan} = \frac{(\text{Rp. } 362.200.316 - \text{Rp. } 333.970.708.419)}{(\text{Rp. } 333.970.708.419)} \times 100\%$$

Dari Tabel diatas jika dimasukkan ke dalam rumus maka diperoleh Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 8,97 % dari tahun dasar 2020. Dai target peningkatan 4,5 % maka diperoleh capaian 199,40% dengan predikat “**Baik Sekali**”.

Tabel 3. 16 Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

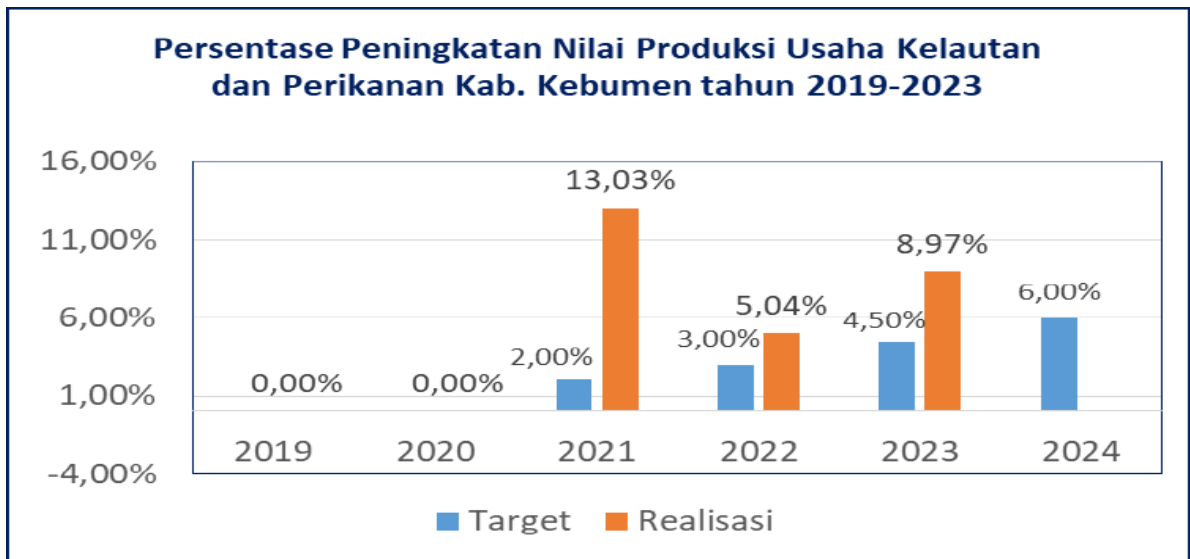
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU Urusan)	4,50 %	8,97%	199,40
2.	Nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU Urusan)	Rp. 348.999.390.298,-	Rp. 363.941.467.288,-	103,78
3.	Nilai Produksi perikanan budidaya (Rp)	Rp. 150.269.795.050,-	Rp. 152.416.467.300,-	101,43
4.	Nilai Produksi perikanan tangkap (Rp)	Rp. 203.618.194.185,-	Rp. 176.664.480.191,-	86,76
5.	Nilai produksi hasil pengolahan perikanan dan garam (Rp)	Rp. 9.331.737.825,-	Rp. 34.860.519.797,-	373,57

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



Grafik 3. 10 Target dan Realisasi Kinerja urusan Kelautan Perikanan Tahun 2023.

Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :



Grafik 3. 11 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

Adapun Kemajuan Realisasi Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan terhadap target akhir RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 17 Kemajuan Capaian Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=(4/5*100)$
2.	Tujuan: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	363,94	5.657,88	6,43%
	Sasaran: Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	8,97	9,00	99,71%

Adapun Faktor pendorong keberhasilan, kendala dan solusi pada pencapaian target kinerja peningkatan Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 18 Faktor Pendorong Keberhasilan, Kendala dan Solusi IKU Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Tujuan: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	5.657,88	363,94	6,43%
	Sasaran: Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	4,5	8,97	199,40%
Faktor Pendorong yang dapat mendukung tercapainya target kinerja					
1.	Adanya pengkalan pendaratan ikan yang aman dan memperhatikan keselamatan nelayan agar tetap bisa berlayar pada saat ombak tinggi				
2.	Tingginya permintaan pasar terhadap produk pengolahan hasil perikanan				
3.	Adanya bantuan hibah sebagai stimulant				
4.	Adanya Shrimp Estate yang meningkatkan produksi perikanan budidaya Kab. Kebumen				
5.	Pelestarian Perairan Umum Daratan (PUD) untuk meningkatkan perikanan tangkap air tawar				
6.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan				
7.	Penyuluhan dan pelatihan terhadap kelompok pembudidaya ikan Kab. Kebumen				
8.	Fasilitasi pelayanan pengujian kesehatan ikan terhadap perikanan tambak dan budidaya lainnya				
9.	Memberikan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk meringankan biaya operasional				
10.	Fasilitasi perijinan kapal dan memiliki TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)				
11.	Meningkatkan kelembagaan nelayan dengan bantuan asuransi atau bantuan sarpras penangkapan ikan				
12.	Adanya sentra kuliner produk perikanan				
13.	Melakukan inovasi pengolahan terhadap ikan tangkapan dengan nilai jual murah				
14.	Bertambahnya jumlah kapal yang menangkap ikan dan banyaknya trip melaut dalam setahun karena cuaca mendukung				
15.	Meningkatkan jumlah kapal bertonase tinggi (diatas GT) dan prasarana sandaran kapal yang memenuhi syarat sepanjang tahun (pasang surut).				
16.	Adanya program dari pemerintah baik APBD Kabupaten (Dana Insentif Daerah – DID) maupun APBD Propinsi (bantuan tunnel).				
17.	Adanya peningkatan kapasitas SDM Kugar dengan adanya pelatihan dan studi banding.				
Faktor Penghambat atau kendala yang dihadapi di tahun 2023					
1.	Kurangnya prasarana pendaratan ikan dan sandaran kapal yang aman sehingga mengurangi trip melaut oleh sebab itu kapal diatas 5 Gross Ton (GT) belum bisa mendaratkan ikan di Kabupaten Kebumen dan kapal dengan ukuran dibawah 5 GT tidak optimal melaut dalam waktu satu tahun				
2.	Ukuran kapal yang kecil di Kabupaten Kebumen sehingga tidak bisa melaut lebih lama dan sangat tergantung oleh cuaca				
3.	Terbatasnya kemampuan pelaku usaha budidaya ikan untuk mandiri				
4.	Kelompok Pengawas Masyarakat terhadap Perairn Umum Daratan (PUD) masih sedikit				
5.	Pengetahuan dan ketrampilan SDM serta modal yang kurang				
6.	Adanya hasil tangkapan yang bernilai jual rendah dalam jumlah besar yaitu ubur-ubur (Rp.900/Kg) yang memiliki porsi sekitar 43,99% terhadap total produksi satu tahun produksi perikanan tangkap laut.				
7.	Kurangnya prasarana pendaratan ikan dan sandaran kapal yang aman sehingga				

	mengurangi trip melaut oleh sebab itu kapal diatas 5 Gross Ton (GT) belum bisa mendaratkan ikan di Kabupaten Kebumen dan kapal dengan ukuran dibawah 5 GT tidak optimal melaut dalam waktu satu tahun
8.	Jumlah produksi perikanan, khususnya perikanan tangkap di laut (yang dilakukan oleh para nelayan) sangat tergantung sekali dari faktor alam/musim. Sebagaimana kita ketahui bersama di tahun 2023 ini sering terjadi adanya gelombang pasang yang sering terjadi, menjadi penyebab terbatasnya trip penangkapan nelayan, akibatnya hasil tangkapan belum maksimal.
9.	Penanganan hasil tangkapan oleh nelayan kurang baik, sehingga menurunkan mutu dan nilai jual hasil tangkapan.
10.	Produktivitas Garam yang masih rendah, karena belum semua kelompok Kugar aktif
11.	Masih tingginya ketergantungan usaha kelompok kepada bantuan pemerintah karena modal yang besar serta resiko kerusakan akibat cuaca.
12.	Belum adanya produk olahan ikan di Kabupaten Kebumen yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan.
13.	Belum adanya sentra kuliner atau sentra ikan segar di pusat kota atau dengan konsep pariwisata.
14.	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk hasil olahan ikan karena mahalnya bahan baku untuk pengolahan hasil perikanan
15.	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk olahan hasil perikanan yang sebagian lebih mahal daripada sumber protein lain. Hal ini dapat dilihat dari perolehan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Kebumen yang sangat rendah yaitu rata-rata dalam setahun hanya 22,33 kg/ka/ta.
Solusi yang dilakukan pada tahun 2023	
1.	Pemberian Hibah Sarpras Perikanan tangkap
2.	Mengusulkan anggaran hibah melalui APBD Kabupaten, provinsi maupun pusat
3.	Melaksanakan diklat teknis budidaya ikan
4.	Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) Pringtutul dan Pasar Ikan di Kutowinangun
5.	Mendorong peningkatan jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
6.	Peningkatan produksi tambak udang masyarakat maupun BUBK melalui penyuluhan dan pemberian sarpras
7.	Meningkatkan restocking ikan di PUD
8.	Bimtek, Pelatihan, Sertifikasi terhadap produk dan SDM
9.	Pembangunan Prasarana Pendaratan Ikan (Breakwater sekaligus sandaran kapal) yang aman dan bisa untuk melakukan kegiatan penangkapan sepanjang tahun kecuali musim Angin Barat untuk kapal dibawah Gross Ton (GT) kecil
10.	Meningkatkan Tonase Kapal Penangkapan Ikan dan Lama Trip
11.	Meningkatkan jumlah kapal dengan Tonase di atas 5 Gross Ton (GT)
12.	Pemberian fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang sesuai standar
13.	Memberikan sosialisasi cara penanganan hasil tangkapan yang baik
14.	Meningkatkan pelatihan dan bimbingan terhadap kelompok usaha garam, supaya produknya dapat bersaing di pasaran
15.	Menumbuhkan kemandirian kelompok usaha garam (Kugar)
16.	Mendorong tumbuhnya Inovasi Produk Usaha Garam.
17.	Menetapkan/mengangkat salah satu produk olahan ikan asli kebumen sebagai produk unggulan hasil olahan ikan khas kabupaten Kebumen
18.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan dengan terus melakukan pembinaan poklhasar serta menjamin ketersediaan bahan baku olahan.

Secara rinci capaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan yang ke-2 (dua) yaitu “Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan” dengan indikator sasaran “Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan” memiliki 3 (empat) indikator kinerja pendukung, yaitu :

- a. Nilai Produksi Perikanan Budidaya
- b. Nilai Produksi Perikanan Tangkap
- c. Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam

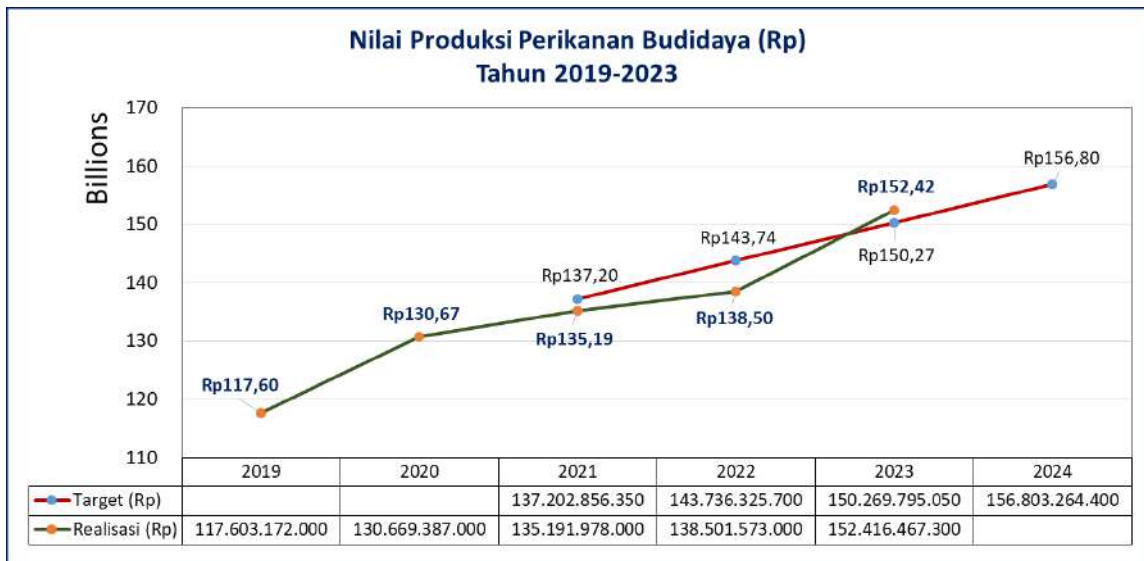
2. Nilai Produksi Perikanan Budidaya

Indikator Program Perikanan Budidaya adalah Realisasi peningkatan Nilai produksi perikanan budidaya (dalam rupiah) dihitung dari data dasar 2020 dengan target peningkatan 15% pada tahun 2023

Tabel 3. 19 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya

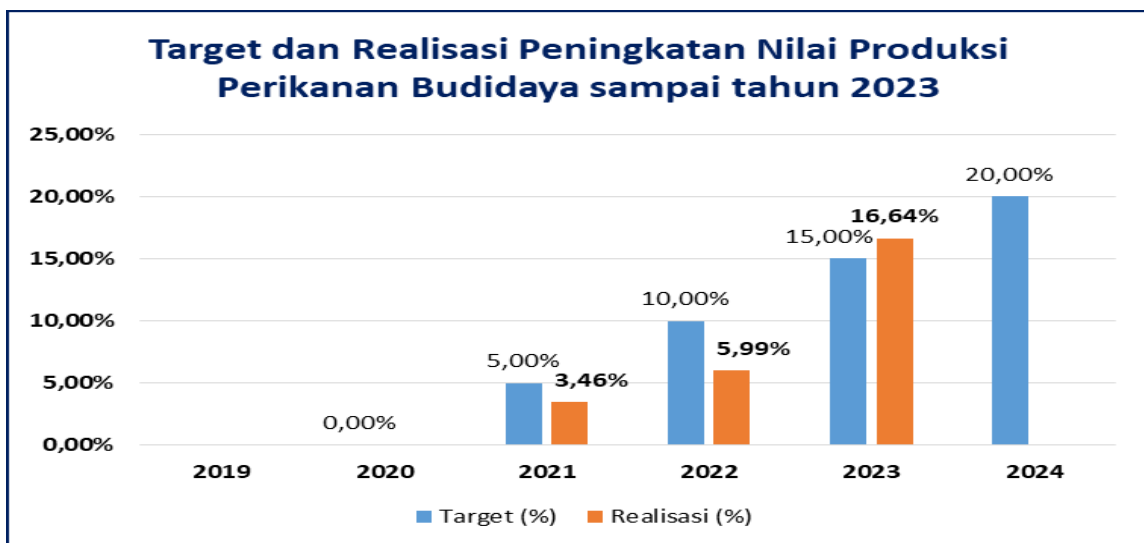
No.	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Peningkatan Nilai Produksi perikanan budidaya	%	15,00	16,64	110,95%	Sangat Baik	• DLHKP Kab. Kebumen 2023
2.	Nilai Produksi perikanan budidaya	Milyar Rupiah	150,27	152,42	101,43%	Sangat Baik	• DLHKP Kab. Kebumen 2023

Indikator Program Perikanan Budidaya adalah Realisasi peningkatan Nilai produksi perikanan budidaya (dalam rupiah) sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang digambarkan grafik sebagai berikut :



Grafik 3. 12 Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Budidaya tahun 2019 – 2023

Pada tahun 2023 target nilai produksi perikanan budidaya (dalam rupiah) sebesar 15% (dari angka dasar tahun 2020) pada indikator Program Pengelolaan Budidaya Perikanan atau setara dengan target Perolehan Rp. 150.269.795.050,- . Sedangkan realisasi nilai produksi perikanan budidaya tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 152.416.467.300,- atau setara dengan peningkatan 16,64% sehingga capaian persentase peningkatan sebesar 110,95% dengan predikat “Sangat Baik”.



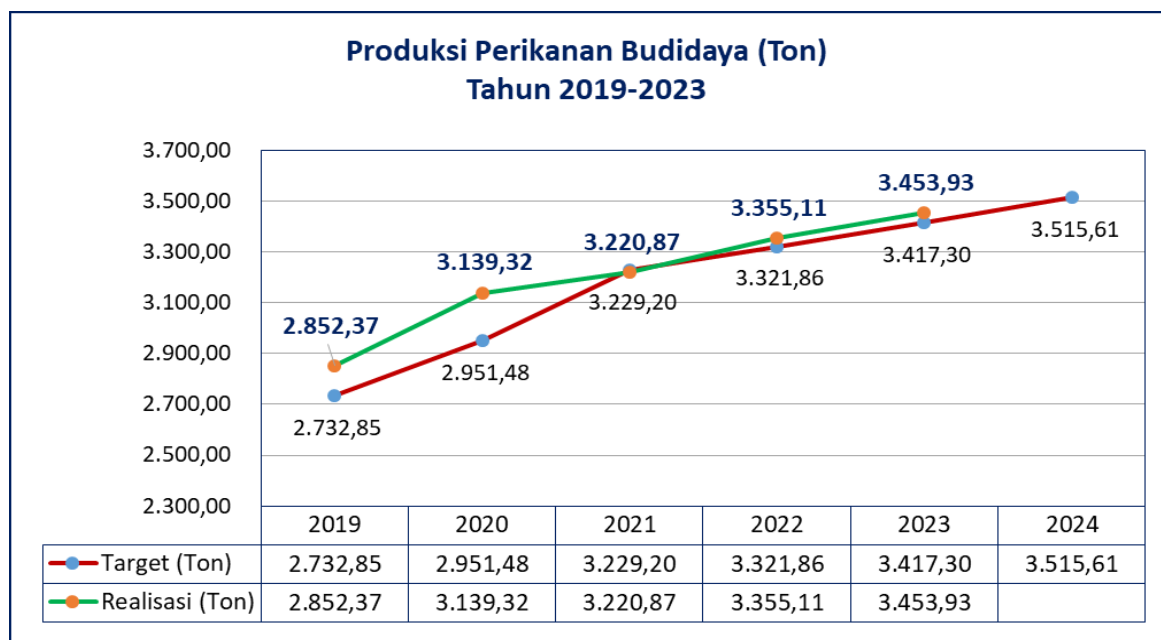
Grafik 3. 13 Realisasi Kinerja Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Tahun 2023

Adapun indikator pada Kegiatan Pengelolaan pembudidaya ikan adalah jumlah produksi perikanan budidaya (ton), yang realisasinya pada tahun 2023 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Pada Akhir Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			T.Akhir Renstra 2026	% Capaian thdp Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	3.355,11	3.417,30	3.453,93	101,07%	3.721,17	92,82
Persentase Capaian kinerja indikator pendukung IKU						92,82%	Baik	

Adapun target dan realisasi jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3. 14 Target dan Realisasi produksi perikanan Budidaya tahun 2019 – 2023

Angka dasar target tahun 2020 sebesar 3.139,32 ton, pada tahun 2021 peningkatan produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 89,88 ton. Sedangkan realisasi jumlah produksi ikan budidaya sebesar 3.220,87 ton. Dengan demikian realisasi peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 81,56 ton,

sehingga capaian kinerjanya adalah 90,74% dengan predikat “Baik”

Kemudian pada tahun 2022 peningkatan produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 92,66 ton (dari angka target tahun 2021) sehingga target Produksi Perikanan Budidaya tahun 2022 adalah sebesar 3.321,86 ton dan Realisasi sebesar 3.355,11 ton atau jika dihitung peningkatan adalah sebesar 125,91 ton dari 92,66 ton yang ditargetkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 135,89% dengan Predikat “Sangat Baik”

Pada tahun 2023 peningkatan produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 95,44 ton setara dengan target Produksi 3.417,30 ton dengan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2023 sebesar 3.453,93 ton. Dengan demikian angka peningkatan adalah sebesar 132,07 ton dari 95,44 ton yang ditargetkan sehingga capaiannya adalah 138,38% dengan predikat “Sangat Baik”

Sasaran kinerja tersebut dicapai melalui 6 sub kegiatan, yaitu :

1. Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 27.666.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.611.100,- sehingga ada efisiensi sebesar Rp54.900,- atau sebesar 0,20%.
2. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 562.055.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 555.493.365,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.561.635, efisiensi sebesar 1,17%
3. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.981.647.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.920.096.147,- sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp61.550.853 atau setara dengan 3,11% merupakan sisa tender atau pengadaan langsung Hibah Barang kepada kelompok pembudidaya ikan Kabupaten Kebumen taun 2023.
4. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 29.654.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.404.250,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 249.750,- atau setara 0,84%.

5. Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat dengan anggaran Rp. 102.576.000,- dan realisasi anggaran Rp. 101.692.156,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp883.844,- atau setara dengan 0,86%.
6. Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat dengan anggaran Rp. 388.617.000,- dan realisasi anggaran Rp. 381.781.530,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp6.835.470,- setara 1,76%.

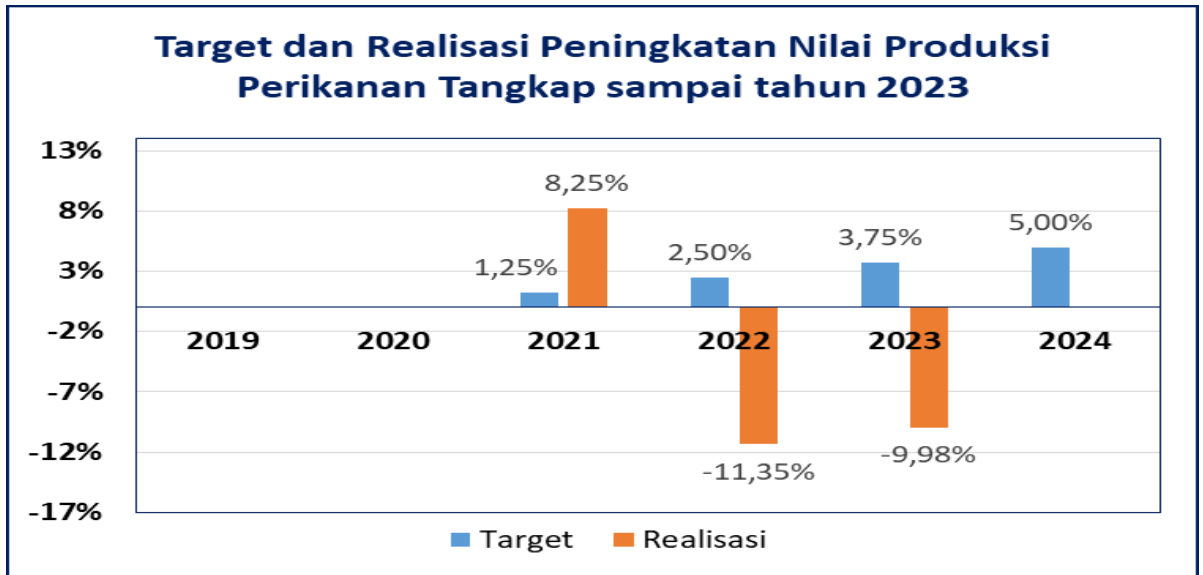
3. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Kendati Indikator Program hanya untuk menghitung tonase produksi yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap dalam kg atau ton, namun karena belum adanya target di Renstra atau Renja untuk capaian PDRB sektor perikanan tangkap yang mendukung IKU Urusan, maka jika diterapkan untuk menghitung peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 21 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Peningkatan Nilai Produksi perikanan tangkap	%	3,75	-9,98	-266,13%	Sangat Kurang	• DLHKP Kab. Kebumen 2023
2.	Nilai Produksi perikanan tangkap	Milyar Rupiah	203,62	176,66	86,76%	Baik	• DLHKP Kab. Kebumen 2023

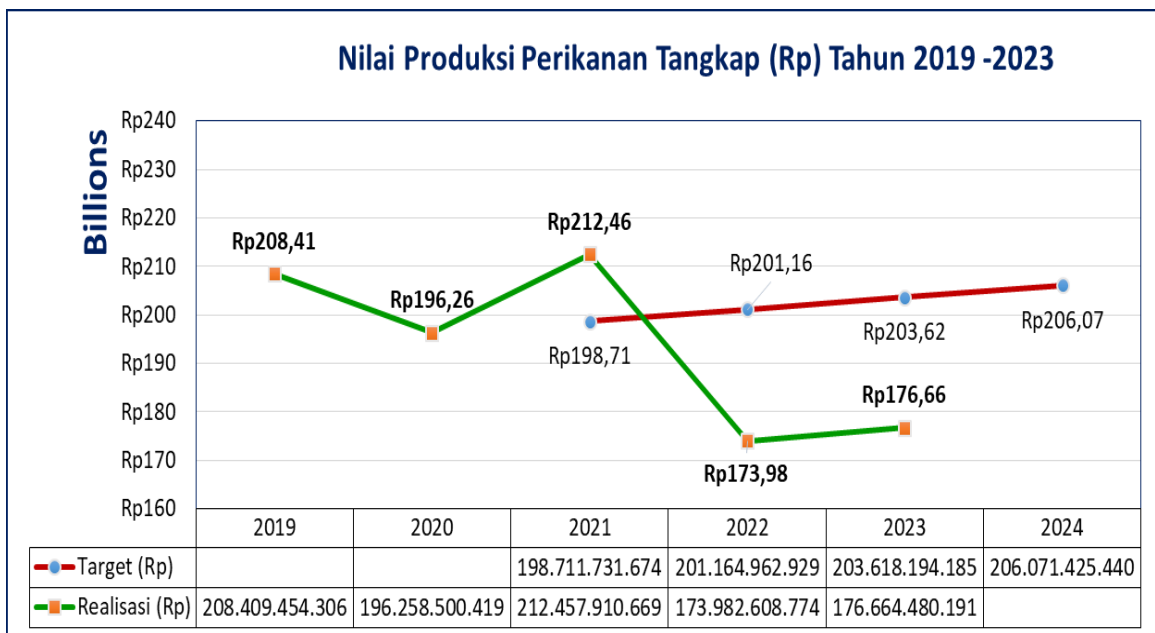
Adapun target dan realisasinya dapat dilihat pada Grafik berikut:



Grafik 3. 15 Target dan Realisasi Nilai Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sampai dengan tahun 2023

Dari grafik diatas terlihat adanya penurunan nilai produksi (Rupiah) pada tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya hasil tangkapan yang bernilai jual rendah dalam jumlah besar yaitu ubur-ubur yang memiliki porsi sekitar 43,99% dari tonase produksi perikanan tangkapan perikanan laut pada tahun 2023. Sedangkan harga jual ubur-ubur sekitar Rp.900,-/ Kg.

Adapun capaian kinerja nilai produksi perikanan tangkap (Rp) sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini ;



Grafik 3. 16 Target dan Realisasi Nilai produksi perikanan Tangkap tahun 2019 – 2023

Jika target peningkatan produksi perikanan tangkap adalah 3.75 % berdasarkan tonase maka diperoleh data pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 22 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Peningkatan Produksi perikanan tangkap	%	3,75	42,23	1.126,09%	Sangat Baik	• DLHKP Kab. Kebumen 2023
2.	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Ton	9.246,23	12.898,02	139,49%	Sangat Baik	• DLHKP Kab. Kebumen 2023

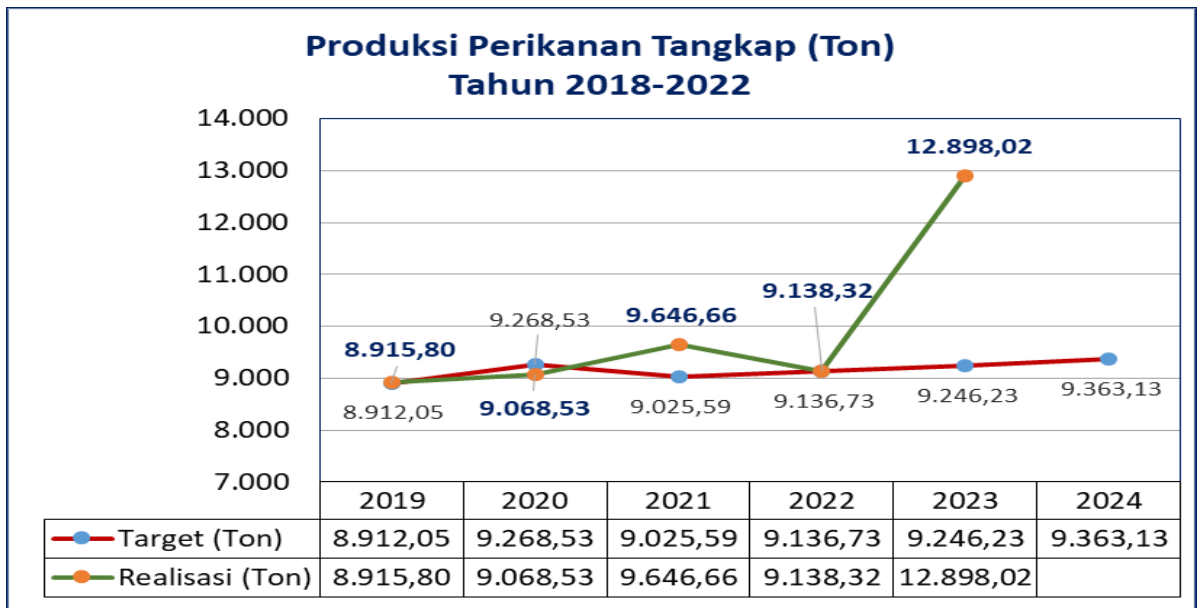
Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan yang drastis dari tonase produksi perikanan tangkap 2023 karena adanya hasil tangkapan yang bernilai jual rendah dalam jumlah besar yaitu ubur-ubur yang memiliki porsi sekitar 43,99%. Sedangkan harga jual ubur-ubur sekitar Rp.900,-/ Kg.

Tingkat kemajuan realisasi Produksi Perikanan Tangkap (ton) terhadap target akhir RPJMD sangat tinggi sehingga sudah melampaui, kendatipun

Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 Terhadap Akhir Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			T.Akhir Renstra 2026	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Ton	9.138,32	9.246,23	12.898,02	139,49	9.595,01	134,42
Persentase Capaian kinerja indikator pendukung IKU						134,42%	Sangat Baik	

Sedangkan target dan realisasi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.14 Target dan Realisasi produksi perikanan Tangkap tahun 2019 – 2023

Angka dasar tahun 2020 sebesar 9.068,53 ton, pada tahun 2021 target produksi tangkapan ikan sebesar 9.025,59 ton. Sedangkan realisasi tangkapan ikan sebesar 9.646,66 ton. Dengan demikian realisasi peningkatan produksi tangkapan ikan tahun 2021 sebesar 621,07 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 106,88%.

Pada tahun 2022 target kinerja produksi perikanan tangkap sebesar 9.136,73 ton, dengan realisasi sebesar 9.138,32 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 100,02% dengan predikat “Sangat Baik “.

Pada tahun 2023 target kinerja sasaran produksi perikanan tangkap sebesar 9.246,23 ton, dengan realisasi sebesar 12.898,02 ton, sehingga capaian kinerjanya adalah 139,49 % dengan predikat “Sangat Baik “.

Sasaran kinerja tersebut dicapai melalui 6 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dengan anggaran Rp. 1.386.152.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.369.129.360,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp17.022.640,- setara 1,23%.
2. Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap dengan anggaran Rp. 555.847.000,- dan realisasi anggaran Rp. 537.506.600,- sehingga ada

efisiensi anggaran sebesar Rp18.340.400,- setara 3,30%.

3. Pengembangan kapasitas nelayan kecil dengan anggaran Rp. 27.600.000,- dan realisasi anggaran Rp. 27.490.200,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp109.800,- setara 0,40%.
4. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil dengan anggaran Rp. 49.816.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.816.000,- dan terserap 100%.
5. Pelayanan penyelenggaraan TPI dengan anggaran Rp. 783.418.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 777.381.800,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp6.036.200,- setara dengan 0,77% .
6. Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT dengan anggaran Rp. 49.816.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.790.900,-, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp25.100,- setara 0,05%.

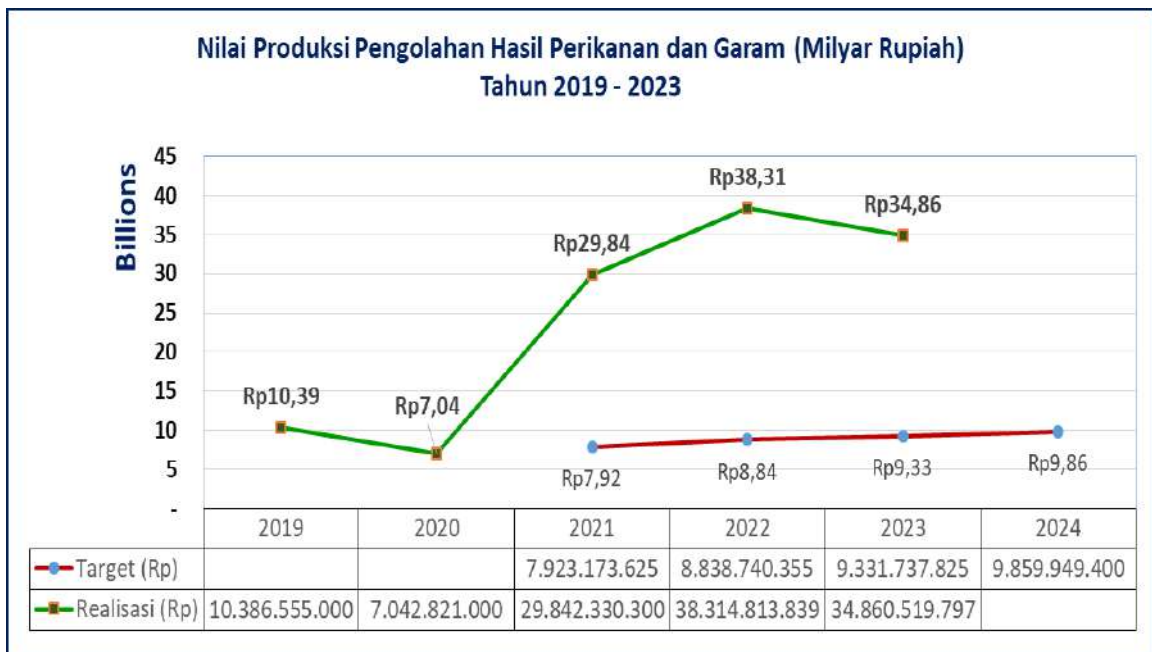
4. Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Garam.

Indikator Program Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 1.215,93% dengan predikat **“Sangat Baik”**.

Tabel 3. 24 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan Tahun 2023

No.	Indikator	Satuan	2023			Kategori	Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	%	32,50%	395,18%	1.215,93%	Sangat Baik	• Bidang Perikanan Tangkap DLHKP Kab. Kebumen 2023
2.	Nilai Produksi Usaha Perikanan	Milyar Rupiah	9,33	34,86	373,57%	Sangat Baik	• DLHKP Kab. Kebumen 2023

Hasil Indikator kinerja Jumlah Nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebagai berikut :



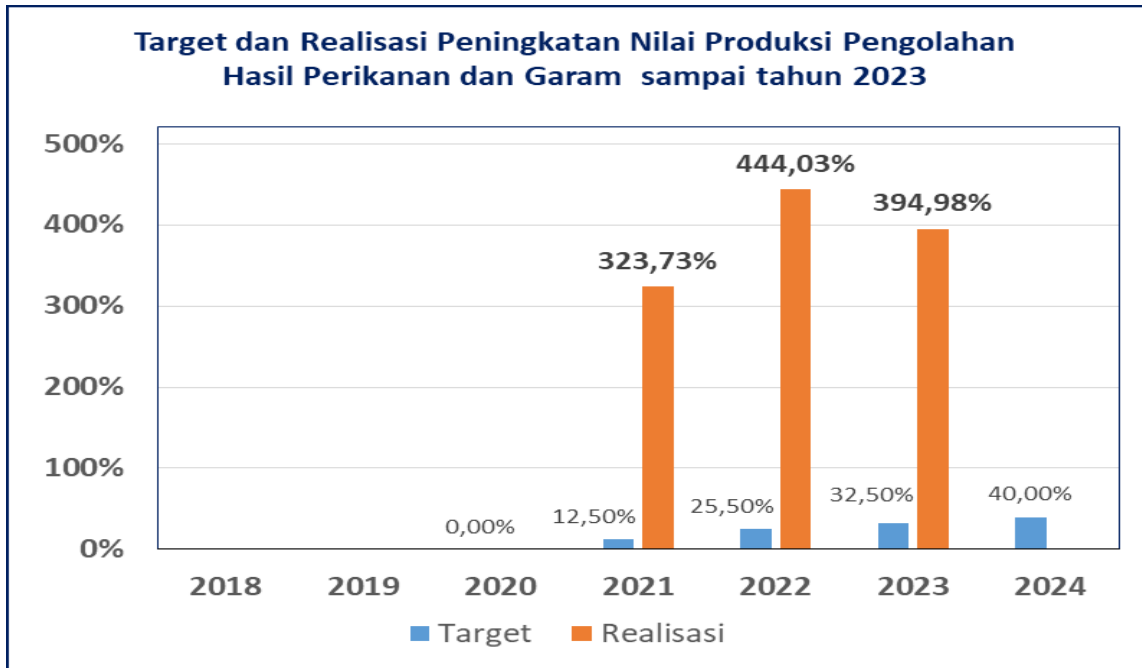
Grafik. 3.11 Target dan Realisasi Nilai Produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Milyar Rupiah) tahun 2019 – 2023.

Pada Tahun 2020 Nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam memiliki capaian Rp. 7.042.821.000, dan pada tahun 2021 ditargetkan kenaikan sebesar 12,5%, dengan perolehan nilai produksi sebesar Rp 29.842.330.300,- dengan peningkatan sangat tinggi sebesar Rp 22.799.509.300,- atau realisasi peningkatannya adalah 323,73%. Capaian pada tahun 2021 adalah 2.589,82% dengan predikat sangat baik.

Pada tahun 2022 peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dan garam ditargetkan sebesar 25,50 % setara dengan Rp. 8.838.740.355,- dengan realisasi nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam dalam rupiah sebesar Rp. 38.314.813.839,- atau setara peningkatan 444,03% dari tahun acuan Renstra (tahun 2020) sehingga Capainya 1.741,28% dengan predikat “Sangat Baik”.

Pada tahun 2023 peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dan garam ditargetkan sebesar 32,50% setara dengan Rp. 9.331.737.825,- dengan realisasi nilai produksi pengolahan hasil perikanan dan garam dalam rupiah sebesar Rp. 34.860.519.797,- atau setara peningkatan 394,98% dari tahun acuan Renstra (tahun 2020) sehingga Capainya 1.215,32 % dengan predikat “Sangat Baik”.

Realisasi dan Target Nilai produksi garam sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 digambarkan dalam grafik sebagai berikut :



Grafik 3.17 Capaian kinerja jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sampai dengan tahun 2023.

Untuk capaian kinerja pengolahan hasil perikanan dan garam (Rp) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami capaian yang sangat baik dengan hasil diatas yang diharapkan yaitu diatas 100%.

Untuk capaian kinerja pengolahan hasil perikanan dan garam (Ton) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Hasil Pengolahan Perikanan dan Garam (Ton) Tahun 2023 Terhadap Akhir Target Renstra

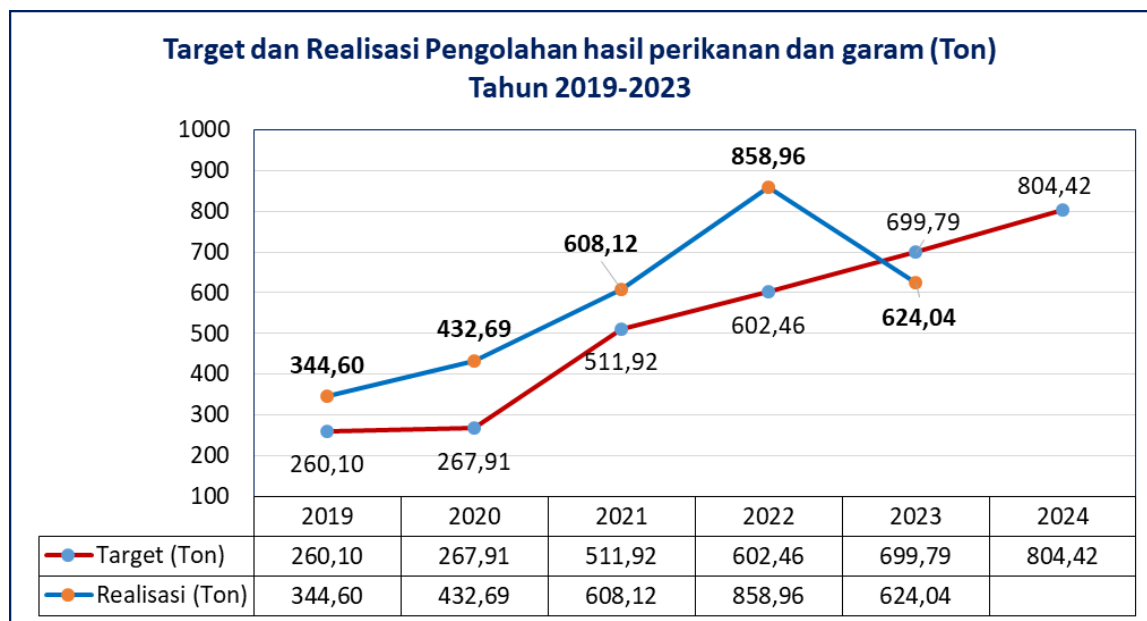
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Th 2022	Tahun 2023			T.Akhir Renstra 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Jumlah produksi hasil pengolahan hasil perikanan dan garam	Ton	858,96	699,79	624,04	89,18%	1.037,82	60,13%
Persentase Capaian kinerja indikator pendukung IKU						60,13%	Kurang	

Angka dasar tahun 2020 sebesar 432,69 ton. Pada tahun **2021** target produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 511,92 ton. Sedangkan realisasi produksi hasil pengolahan perikanan dan garam sebesar 608,12 ton. Dengan demikian capaian produksi pengolahan hasil perikanan dan garam adalah sebesar 118,79%, dengan predikat “Sangat Baik”.

Pada tahun **2022** target produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 602,46 ton dan Realisasi sebesar 858,96 ton sehingga capaiannya sebesar 142,58% dengan predikat “Sangat Baik”.

Pada tahun **2023** target produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 699,79 ton dan Realisasi sebesar 624,04 ton sehingga capaiannya sebesar 89,18% dengan predikat “Baik”.

Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dan garam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini;



Grafik. 3.11 Target dan Realisasi produksi pengolahan hasil perikanan dan garam (Ton) tahun 2019 – 2023.

Pada tahun 2021 target produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 511,92 ton. Sedangkan realisasi produksi hasil pengolahan perikanan dan garam sebesar 608,12 ton. Dengan demikian capaian produksi pengolahan hasil perikanan dan garam adalah sebesar 118,79% dengan predikat “Sangat Baik”.

Pada tahun 2022 target produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 602,46 ton. Sedangkan realisasi produksi hasil pengolahan perikanan dan garam sebesar 858,96 ton. Dengan demikian capaian produksi pengolahan hasil perikanan dan garam adalah sebesar 142,58%, dengan predikat “Sangat Baik”.

Pada tahun 2023 target produksi pengolahan hasil perikanan dan garam sebesar 699,79 ton. Sedangkan realisasi produksi hasil pengolahan perikanan dan garam sebesar 624,04 ton. Dengan demikian capaian produksi pengolahan hasil perikanan dan garam adalah sebesar 89,18% dengan predikat “Baik”.

Pada Tahun 2023 Produksi Pengolahan Ikan dan Garam mengalami penurunan dikarenakan Produksi Garam yang menurun drastis akibat kerusakan thunnel garam yang disebabkan oleh angin dan cuaca. Untuk mengurangi kerusakan thunnel harus dilakukan perbaikan prasarana dari segi kekuatan bahan, aerodinamika dan perlakuan khusus terhadap adanya perbedaan tekanan udara di luar dan di dalam thunnel yang ekstrim, serta perlakuan lain untuk mencegah kerusakan prasarana produksi garam.

Adapun Indikator kinerja tersebut dicapai melalui 3 sub kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan anggaran sebesar Rp. 63.182.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.086.969,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp95.031,- atau setara dengan 0,15%.
2. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar 63.439.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.336.455,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp102.545,- setara dengan 0,16%.
3. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 256.843.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 254.948.080,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp1.894.920,- atau setara 0,74%.

3.2. Realisasi Anggaran dan Efisiensi

Dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 33.125.485.000,-Realisasi sebesar Rp. 32.496.312.567,- dengan Realisasi Anggaran (98,10 %). Anggaran tersebut untuk melaksanakan 14 program dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran dan Efisiensi berdasarkan program sebagaimana rumus berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}) - \text{RAKi})}{\sum_{i=1}^n (\text{PAKi} \times \text{CKi})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((\text{Pagu Anggaran Keluaran } i \times \text{Capaian Keluaran } i) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran } i)}{(\text{Pagu Anggaran Keluaran } i \times \text{Capaian Keluaran } i)} \times 100\%$$

PAKi = Pagu Anggaran Keluaran i

CKi = Capaian Keluaran i

RAKi = Realisasi Anggaran keluaran i

Tabel 3. 26 Realisasi Anggaran dan Efisiensi Belanja Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisa-si	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00	12.730.556.000	12.339.942.311	96,93	0,99
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	7	7	100,00	168.554.000	167.927.760	99,63	0,99
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasikeuangan perangkat daerah	12	12	100,00	11.749.901.000	11.394.582.760	96,98	0,99
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	12	100,00	54.838.000	54.508.500	99,40	0,99
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100,00	174.352.000	174.135.076	99,88	0,99

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisa-si	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja (%)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	5	125,00	31.630.000	31.384.000	99,22	0,99
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100,00	342.579.000	309.580.721	90,37	0,99
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100,00	208.702.000	207.823.494	99,58	0,99
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	62,50	68,75	110,00	342.358.000	332.736.963	97,19	0,99
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	2	3	150,00	342.358.000	332.736.963	97,19	0,99
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,19	67,16	90,52	1.263.719.400	1.247.652.807	98,73	0,99
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3	3	100,00	380.836.000	371.454.421	97,54	0,99
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	11	6	54,55	59.340.000	58.915.154	99,28	0,98
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	15	19	126,67	823.543.400	817.283.232	99,24	0,99
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	33,33	36,67	110,01	2.374.753.600	2.360.814.567	99,41	0,99
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati	1	1	100,00	2.374.753.600	2.360.814.567	99,41	0,99

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisa-si	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja (%)
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	40,00	40,17	100,42	38.531.000	38.147.354	99,00	0,99
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3	30	31	103,33	38.531.000	38.147.354	99,00	0,99
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	10,43	8,64	82,82	69.055.000	68.869.614	99,73	0,99
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	125	69	55,20	69.055.000	68.869.614	99,73	0,98
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	15,65	15,22	97,24	82.043.000	81.814.863	99,72	0,99
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	15	61	406,67	82.043.000	81.814.863	99,72	1,00
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup	50,00	70,83	141,67	46.656.000	46.453.400	99,57	0,99
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	16	18	112,50	46.656.000	46.453.400	99,57	0,99
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100	100	100,00	16.464.000	15.179.500	92,20	0,99

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisa-si	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja (%)
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	10	17	170,00	16.464.000	15.179.500	92,20	0,99
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	27,00	50,00	185,19	9.779.565.000	9.703.525.876	99,22	0,99
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah	5	5	100,00	9.779.565.000	9.703.525.876	99,22	0,99
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Rp)	3,75	42,23	1.126,09	2.852.649.000	2.811.114.860	98,54	1,00
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	9.246,23	12.898,02	139,49	1.941.999.000	1.906.635.960	98,18	0,99
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan	35	31	88,57	77.416.000	77.306.200	99,86	0,99
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	8	8	100,00	783.418.000	777.381.800	99,23	0,99
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kapal perikanan yang berijin	34,15	35,24	103,19	49.816.000	49.790.900	99,95	0,99
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	15,00	16,64	110,95	3.092.215.000	3.016.078.548	97,54	0,99
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	105	106	100,95	27.666.000	27.611.100	99,80	0,99

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisa-si	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja (%)
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	95,44	132,07	138,38	3.064.549.000	2.988.467.448	97,52	0,99
13	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	78,57	78,57	100,00	53.456.000	52.610.400	98,42	0,99
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	7	7	100,00	53.456.000	52.610.400	98,42	0,99
14	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	32,50	395,18	1.215,93	383.464.000	381.371.504	99,45	1,00
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklaksar) yang mendapatkan pembinaan	7	7	100,00	63.182.000	63.086.969	99,85	0,99
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	97,33	21,58	22,17	320.282.000	318.284.535	99,38	0,96
					262,20	33.125.485.000	32.496.312.567	98,10	13,89

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Sehingga berdasarkan perhitungan efisiensi capaian kinerja program dan kegiatan terhadap realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar 13,89 %.

Tabel 3. 27 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2023

a) Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,19	67,16	90,52%	Menunjang
No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00	Menunjang
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang tersusun	7	7	100,00	Menunjang
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasikeuangan perangkat daerah	12	12	100,00	Menunjang
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	12	100,00	Menunjang
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	100,00	Menunjang
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	5	125,00	Menunjang
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100,00	Menunjang
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100,00	Menunjang
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	62,50	68,75	110,00	Menunjang
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	2	3	150,00	Menunjang
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,19	67,16	90,52	Menunjang

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3	3	100,00	Menunjang
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	11	6	54,55	Menunjang
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	15	19	126,67	Menunjang
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penanganan keanekaragaman hayati daerah	33,33	36,67	110,01	Menunjang
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan kehati	1	1	100,00	Menunjang
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3	40,00	40,17	100,42	Menunjang
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi dan verifikasi pengelolaan B3 dan LB3	30	31	103,33	Menunjang
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan kegiatan usaha dan penanganan ijin lingkungan	10,43	8,64	82,82	Menunjang
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	125	69	55,20	Menunjang
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	15,65	15,22	97,24	Menunjang
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	15	61	406,67	Menunjang

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup	50,00	70,83	141,67	Menunjang
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	16	18	112,50	Menunjang
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	100	100	100,00	Menunjang
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	10	17	170,00	Menunjang
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	27,00	50,00	185,19	Menunjang
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah Kegiatan pengelolaan sampah	5	5	100,00	Menunjang

b) Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Menunjang/ tidak menunjang
2.	Tujuan: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	5.657, 88	363,94	6,43%	Menunjang
	Sasaran: Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	4,5	8,97	199,42%	Menunjang
No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Menunjan/ Tidak menunjang
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Rp)	3,75	42,23	1.126,09	Menunjang
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	9.246,2 3	12.898,02	139,49	Menunjang

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Menunjang /tidak menunjang
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan	35	31	88,57	Menunjang
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	8	8	100,00	Menunjang
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kapal perikanan yang berijin	34,15	35,24	103,19	Menunjang
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	15,00	16,64	110,95	Menunjang
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan	105	106	100,95	Menunjang
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	95,44	132,07	138,38	Menunjang
13	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	78,57	78,57	100,00	Menunjang
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Perairan Umum Daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	7	7	100,00	Menunjang
14	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	32,50	395,18	1.215,93	Menunjang
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklachsar) yang mendapatkan pembinaan	7	7	100,00	Menunjang

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Menunjang /tidak menunjang
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	97,33	21,58	22,17	Menunjang
					262,20	

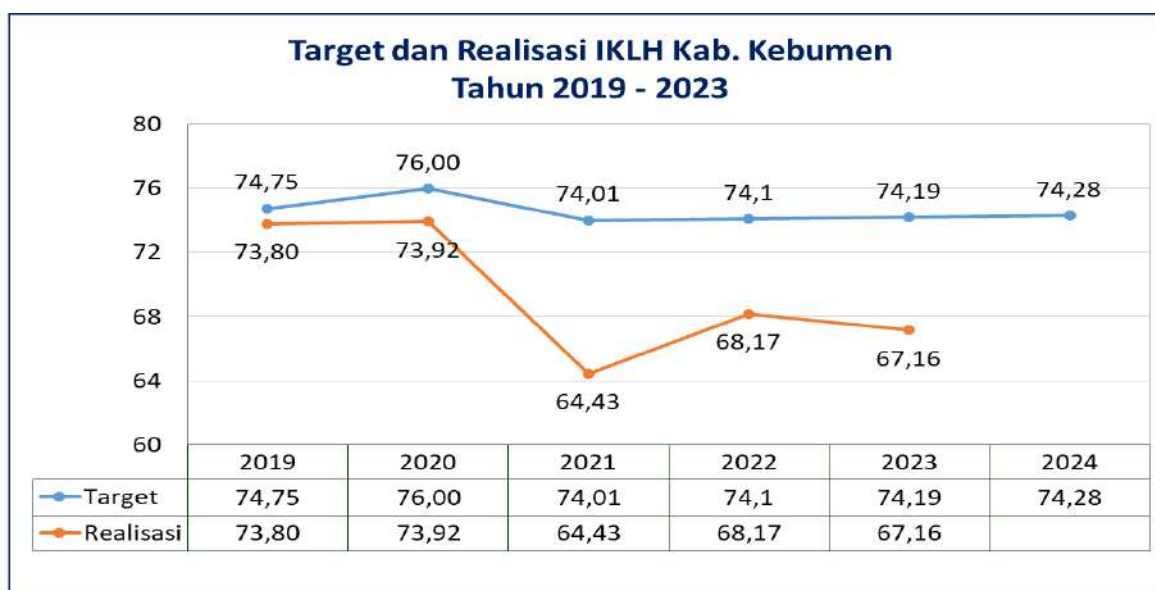
BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja dan Permasalah/Kendala

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen, menunjukkan bahwa belum semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target, dimana 1 (satu) indikator dapat tercapai, sedangkan 1 (satu) indikator belum dapat tercapai sesuai dengan target. Nilai capaian indikator untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Urusan Lingkungan Hidup

Target dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 4. 1 Target dan Realisasi Urusan Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023

Tabel 4. 1 Capaian, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat serta Solusi dalam Pencapaian Target Indikator Urusan Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,19	67,16	90,52%
Faktor Pendorong yang dapat mendukung tercapainya target kinerja					
1.	Menurunkan tingkat pencemaran air (Limbah rumah tangga maupun industri);				
2.	Menurunnya tingkat ODF (Open Defecation Free) atau Bebas buang air besar yang dapat mencemari sungai;				
3.	Pengurangan penebangan pohon dan memperbanyak penanaman pohon;				
4.	Mengurangi Emisi dari kendaraan bermotor dengan memperbanyak angkutan masal, melakukan uji kendaraan secara menyeluruh, beralih ke kendaraan listrik atau sepeda dan memperbanyak bicycle path;				
5.	Memperbanyak penanaman jenis pohon ayoman jalan yang dapat mengurangi emisi karbon;				
6.	Memperbanyak Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik-Terpusat pada permukiman padat penduduk;				
7.	Upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH;				
8.	Penanganan yang cepat terhadap pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;				
9.	Penyusunan peraturan desa tentang lingkungan hidup, terutama pada daerah yang terdapat lahan kritis dan awan bencana;				
10.	Meningkatkan akuntabilitas Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup melalui inventarisasi data yang kredibel sehingga pengambilan keputusan lebih tepat dan efektif untuk menurunkan tingkat pencemaran; dan				
11.	Perbaikan metode pengambilan data/ pengujian, menjaga standarisasi ISO/ SNI, memperbanyak titik sample, pemilihan penyedia yang profesional dalam segi metodologi, peralatan maupun tingkat pengalamannya dalam hal konsultasi Lingkungan Hidup.				
Faktor Penghambat atau kendala yang dihadapi di tahun 2023					
1.	Adanya pertambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup;				
2.	Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan				
3.	Penentuan target IKLH belum akuntabel dengan penyediaan anggaran yang seharusnya disiapkan dalam rencana pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau target dalam Perda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam jangka panjang.				
4.	Terbatasnya waktu, anggaran dan prasarana (maps yang belum update) dalam inventarisasi luasan Tutupan Lahan untuk perhitungan IKLH setiap tahunnya				
Solusi yang dilakukan pada tahun 2023					
1.	Sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap masyarakat, perihal pengendalian pencemaran lingkungan serta program konservasi sumberdaya alam. Hal ini				

	sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik;
2.	Adanya demplot/percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan “model” pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran;
3.	Upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha/kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH
4.	Melakukan konservasi lahan secara massif, melalu gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip” dan pelaksanaan program unggulan Bupati Kebumen “Nandur Wit Nggo Anak Putu”;
5.	Fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Restorasi;
6.	Pelatihan dan Sosialisasi terhadap industri kecil;
7.	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan
8.	Inventarisasi mandiri Luasan RTH Kabupaten Kebumen, Luasan Tutupan Lahan Kabupaten Kebumen tahun 2023.

2. Urusan Kelautan dan Perikanan



Grafik 4. 2 Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Tabel 4. 2 Tabel Capaian, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat serta Solusi Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan, yaitu Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Tujuan: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	5.657,88	363,94	6,43%
	Sasaran: Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	4,5	8,97	199,40%

Faktor Pendorong yang dapat mendukung tercapainya target kinerja	
1.	Adanya pengkalan pendaratan ikan yang aman dan memperhatikan keselamatan nelayan agar tetap bisa berlayar pada saat ombak tinggi
2.	Tingginya permintaan pasar terhadap produk pengolahan hasil perikanan
3.	Adanya bantuan hibah sebagai stimulant
4.	Adanya Shrimp Estate yang meningkatkan produksi perikanan budidaya Kab. Kebumen
5.	Pelestarian Perairan Umum Daratan (PUD) untuk meningkatkan perikanan tangkap air tawar
6.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan
7.	Penyuluhan dan pelatihan terhadap kelompok pembudidaya ikan Kab. Kebumen
8.	Fasilitasi pelayanan pengujian kesehatan ikan terhadap perikanan tambak dan budidaya lainnya
9.	Memberikan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk meringankan biaya operasional
10.	Fasilitasi perijinan kapal dan memiliki TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)
11.	Meningkatkan kelembagaan nelayan dengan bantuan asuransi atau bantuan sarpras penangkapan ikan
12.	Adanya sentra kuliner produk perikanan
13.	Melakukan inovasi pengolahan terhadap ikan tangkapan dengan nilai jual murah
14.	Bertambahnya jumlah kapal yang menangkap ikan dan banyaknya trip melaut dalam setahun karena cuaca mendukung
15.	Meningkatkan jumlah kapal bertonase tinggi (diatas GT) dan prasarana sandaran kapal yang memenuhi syarat sepanjang tahun (pasang surut).
16.	Adanya program dari pemerintah baik APBD Kabupaten (Dana Insentif Daerah – DID) maupun APBD Propinsi (bantuan tunnel).
17.	Adanya peningkatan kapasitas SDM Kugar dengan adanya pelatihan dan studi banding.
Faktor Penghambat atau kendala yang dihadapi di tahun 2023	
1.	Kurangnya prasarana pendaratan ikan dan sandaran kapal yang aman sehingga mengurangi trip melaut oleh sebab itu kapal diatas 5 Gross Ton (GT) belum bisa mendaratkan ikan di Kabupaten Kebumen dan kapal dengan ukuran dibawah 5 GT tidak optimal melaut dalam waktu satu tahun
2.	Ukuran kapal yang kecil di Kabupaten Kebumen sehingga tidak bisa melaut lebih lama dan sangat tergantung oleh cuaca
3.	Terbatasnya kemampuan pelaku usaha budidaya ikan untuk mandiri
4.	Kelompok Pengawas Masyarakat terhadap Perairan Umum Daratan (PUD) masih sedikit
5.	Pengetahuan dan ketrampilan SDM serta modal yang kurang
6.	Adanya hasil tangkapan yang bernilai jual rendah dalam jumlah besar yaitu ubur-ubur (Rp.900/Kg) yang memiliki porsi sekitar 43,99% terhadap total produksi satu tahun produksi perikanan tangkap laut.
7.	Kurangnya prasarana pendaratan ikan dan sandaran kapal yang aman sehingga mengurangi trip melaut oleh sebab itu kapal diatas 5 Gross Ton (GT) belum bisa mendaratkan ikan di Kabupaten Kebumen dan kapal dengan ukuran dibawah 5 GT tidak optimal melaut dalam waktu satu tahun
8.	Jumlah produksi perikanan, khususnya perikanan tangkap di laut (yang dilakukan oleh para nelayan) sangat tergantung sekali dari faktor alam/musim. Sebagaimana kita ketahui bersama di tahun 2023 ini sering terjadi adanya gelombang pasang yang sering terjadi, menjadi penyebab terbatasnya trip penangkapan nelayan, akibatnya hasil tangkapan belum maksimal.
9.	Penanganan hasil tangkapan oleh nelayan kurang baik, sehingga menurunkan mutu dan nilai jual hasil tangkapan.
10.	Produktivitas Garam yang masih rendah, karena belum semua kelompok Kugar aktif
11.	Masih tingginya ketergantungan usaha kelompok kepada bantuan pemerintah karena modal yang besar serta resiko kerusakan akibat cuaca.

12.	Belum adanya produk olahan ikan di Kabupaten Kebumen yang dapat dijadikan sebagai produk unggulan.
13.	Belum adanya sentra kuliner atau sentra ikan segar di pusat kota atau dengan konsep pariwisata.
14.	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas produk hasil olahan ikan karena mahalnya bahan baku untuk pengolahan hasil perikanan
15.	Rendahnya daya beli masyarakat terhadap produk olahan hasil perikanan yang sebagian lebih mahal daripada sumber protein lain. Hal ini dapat dilihat dari perolehan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Kebumen yang sangat rendah yaitu rata-rata dalam setahun hanya 22,33 kg/ka/ta.
Solusi yang dilakukan pada tahun 2023	
1.	Pemberian Hibah Sarpras Perikanan tangkap
2.	Mengusulkan anggaran hibah melalui APBD Kabupaten, provinsi maupun pusat
3.	Melaksanakan diklat teknis budidaya ikan
4.	Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) Pringtutul dan Pasar Ikan di Kutowinangun
5.	Mendorong peningkatan jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
6.	Peningkatan produksi tambak udang masyarakat maupun BUBK melalui penyuluhan dan pemberian sarpras
7.	Meningkatkan restocking ikan di PUD
8.	Bimtek, Pelatihan, Sertifikasi terhadap produk dan SDM
9.	Pembangunan Prasarana Pendaratan Ikan (Breakwater sekaligus sandaran kapal) yang aman dan bisa untuk melakukan kegiatan penangkapan sepanjang tahun kecuali musim Angin Barat untuk kapal dibawah Gross Ton (GT) kecil
10.	Meningkatkan Tonase Kapal Penangkapan Ikan dan Lama Trip
11.	Meningkatkan jumlah kapal dengan Tonase di atas 5 Gross Ton (GT)
12.	Pemberian fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang sesuai standar
13.	Memberikan sosialisasi cara penanganan hasil tangkapan yang baik
14.	Meningkatkan pelatihan dan bimbingan terhadap kelompok usaha garam, supaya produknya dapat bersaing di pasaran
15.	Menumbuhkan kemandirian kelompok usaha garam (Kugar)
16.	Mendorong tumbuhnya Inovasi Produk Usaha Garam.
17.	Menetapkan/mengangkat salah satu produk olahan ikan asli kebumen sebagai produk unggulan hasil olahan ikan khas kabupaten Kebumen
18.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan dengan terus melakukan pembinaan poklhasar serta menjamin ketersediaan bahan baku olahan.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja.

Dalam rangka peningkatan dan pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang, beberapa strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dengan melihat faktor pendukung, faktor penghambat serta solusi yang dilaksanakan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditentukan. Hambatan dan permasalahan yang

terjadi perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang dengan cara Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan melibatkan stakeholder terkait serta perlunya dilakukan sistem pengendalian yang memadai, Meningkatkan inovasi dan kreativitas, untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang ada serta Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023, untuk dapat menjadikan masukan bagi pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam mensukseskan program-program dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ASEP NURDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 1993111001

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris	t	
Kabid		
..... Dasi / Kasubbag Perencanaan	g	30/1-2024

LAMPIRAN 1 : REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD

NO	NAMA PAD	TARGET 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	725.000.000	780.430.000	107,65	-7,65
2.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	473.237.149	396.893.410	83,87	16,13
3.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	220.000.000	232.493.600	105,68	-5,68
4.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.910.562.251	1.430.139.484	74,85	25,15
5.	Hasil Penjualan Biota Perairan	130.000.000	64.200.000	49,38	50,62
	JUMLAH	3.458.799.400	2.904.156.494	83,96	16,04

II. BELANJA DAERAH (APBD KABUPATEN)

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
	TOTAL ANGGARAN DLHKP	33.125.485.000	32.496.312.567	98,10	1,90
	Urusan Penunjang	12.730.556.000	12.339.942.311	96,93	3,07
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.730.556.000	12.339.942.311	96,93	3,07
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	168.554.000	167.927.760	99,63	0,37
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.459.000	115.047.100	99,64	0,36
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.095.000	52.880.660	99,60	0,40
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.749.901.000	11.394.582.760	96,98	3,02
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.171.368.000	10.816.312.744	96,82	3,18
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	578.533.000	578.270.016	99,95	0,05
III.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.838.000	54.508.500	99,40	0,60
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	39.750.000	99,38	0,63
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.838.000	14.758.500	99,46	0,54
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.352.000	174.135.076	99,88	0,12
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.839.000	7.838.000	99,99	0,01

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.384.000	1.384.000	100,0 0	-
3	Penyediaan bahan logistik	47.534.000	47.458.450	99,84	0,16
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.861.000	11.861.000	100,0 0	-
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	100,0 0	-
6	Penyediaan bahan/material	19.770.000	19.758.000	99,94	0,06
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	83.380.000	83.251.626	99,85	0,15
8	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1.384.000	1.384.000	100,0 0	-
IV.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.630.000	31.384.000	99,22	0,78
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.630.000	31.384.000	99,22	0,78
2.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	0	0	-	-
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.579.000	309.580.721	90,37	9,63
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.977.000	1.970.000	99,65	0,35
2.	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	274.409.000	241.514.721	88,01	11,99
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	66.193.000	66.096.000	99,85	0,15
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.702.000	207.823.494	99,58	0,42
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	156.912.000	156.134.494	99,50	0,50
2	Pemeliharaan mebel	2.444.000	2.410.000	98,61	1,39
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9.398.000	9.398.000	100,0 0	-
4	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	39.948.000	39.881.000	99,83	0,17
	Urusan Lingkungan Hidup	14.013.145.000	13.895.194.944	99,16	0,84
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	342.358.000	332.736.963	97,19	2,81
I.	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	342.358.000	332.736.963	97,19	2,81
1.	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	39.538.000	39.488.748	99,88	0,12

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	302.820.000	293.248.215	96,84	3,16
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.263.719.400	1.247.652.807	98,73	1,27
I.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	380.836.000	371.454.421	97,54	2,46
1.	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	20.294.000	20.245.800	99,76	0,24
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	15.816.000	15.656.100	98,99	1,01
3.	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	344.726.000	335.552.521	97,34	2,66
II.	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59.340.000	58.915.154	99,28	0,72
1.	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	39.570.000	39.444.854	99,68	0,32
2.	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	19.770.000	19.470.300	98,48	1,52
III.	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	823.543.400	817.283.232	99,24	0,76
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemara	17.299.000	16.885.966	97,61	2,39
2.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	758.798.000	753.623.616	99,32	0,68
3.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi	47.446.400	46.773.650	98,58	1,42
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.374.753.600	2.360.814.567	99,41	0,59
I.	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.374.753.600	2.360.814.567	99,41	0,59
1.	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	0	-	-	-

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
2.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.266.023.000	2.253.198.529	99,43	0,57
3.	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	14.826.600	14.528.188	97,99	2,01
4.	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	93.904.000	93.087.850	99,13	0,87
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	38.531.000	38.147.354	99,00	1,00
I.	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	38.531.000	38.147.354	99,00	1,00
1.	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	22.241.000	21.885.254	98,40	1,60
2.	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	16.290.000	16.262.100	99,83	0,17
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	69.055.000	68.869.614	99,73	0,27
I.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.055.000	68.869.614	99,73	0,27
1.	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	15.820.000	15.816.300	99,98	0,02
2.	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	53.235.000	53.053.314	99,66	0,34
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	82.043.000	81.814.863	99,72	0,28

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
I.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.043.000	81.814.863	99,72	0,28
1.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	52.389.000	52.287.700	99,81	0,19
2.	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	29.654.000	29.527.163	99,57	0,43
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	46.656.000	46.453.400	99,57	0,43
I.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.656.000	46.453.400	99,57	0,43
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46.656.000	46.453.400	99,57	0,43
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	16.464.000	15.179.500	92,20	7,80
I.	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16.464.000	15.179.500	92,20	7,80
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	16.464.000	15.179.500	92,20	7,80
2.	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengendalian atau melalui pengadilan	0	-	-	-
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.779.565.000	9.703.525.876	99,22	0,78
I.	Kegiatan Pengelolaan Sampah	9.779.565.000	9.703.525.876	99,22	0,78
1.	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	12.850.000	12.786.700	99,51	0,49
2.	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	98.846.000	98.666.625	99,82	0,18

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
3.	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	8.067.644.000	7.997.428.927	99,13	0,87
4.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	88.527.000	88.394.690	99,85	0,15
5.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	1.511.698.000	1.506.248.934	99,64	0,36
	Urusan Perikanan	6.381.784.000	6.261.175.312	98,11	1,89
K	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.852.649.000	2.811.114.860	98,54	1,46
I.	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.941.999.000	1.906.635.960	98,18	1,82
1.	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	1.386.152.000	1.369.129.360	98,77	1,23
2.	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	555.847.000	537.506.600	96,70	3,30
II.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	77.416.000	77.306.200	99,86	0,14
1.	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	27.600.000	27.490.200	99,60	0,40
2.	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	49.816.000	49.816.000	100,00	-
III.	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	783.418.000	777.381.800	99,23	0,77
1.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	783.418.000	777.381.800	99,23	0,77
IV.	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.816.000	49.790.900	99,95	0,05
1.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	49.816.000	49.790.900	99,95	0,05

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
L	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.092.215.000	3.016.078.548	97,54	2,46
I.	Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.666.000	27.611.100	99,80	0,20
1.	Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.666.000	27.611.100	99,80	0,20
II.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.064.549.000	2.988.467.448	97,52	2,48
1.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaen/Kota	562.055.000	555.493.365	98,83	1,17
2.	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1.981.647.000	1.920.096.147	96,89	3,11
3.	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaen/Kota	29.654.000	29.404.250	99,16	0,84
4.	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	102.576.000	101.692.156	99,14	0,86
5.	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	388.617.000	381.781.530	98,24	1,76
M	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.456.000	52.610.400	98,42	1,58
I.	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	53.456.000	52.610.400	98,42	1,58
1.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	53.456.000	52.610.400	98,42	1,58
N	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	383.464.000	381.371.504	99,45	0,55
I.	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	63.182.000	63.086.969	99,85	0,15

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI KEUANGAN		SILPA (%)
			(Rp)	(%)	
1.	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	63.182.000	63.086.969	99,85	0,15
II.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	320.282.000	318.284.535	99,38	0,62
1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.439.000	63.336.455	99,84	0,16
2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	256.843.000	254.948.080	99,26	0,74
JUMLAH		33.125.485.000	32.496.312.567	98,10	1,90

LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Arungbinang No. 21 Kabupaten Kebumen
Telp/ Faksimile: (0287) 381245 e-mail: dlhkpkebumen@gmail.com
Website: www.dlhkp.kebumenkab.go.id Kode Pos: 54351

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen

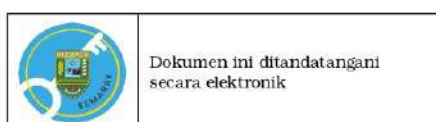
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

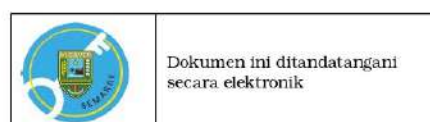
Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

Pihak Pertama,



Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.
NIP. 19730201 199311 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,19	74,19	0	0	0	74,19
	Sasaran : Meningkatkannya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,19	74,19	0	0	0	74,19
2	Tujuan : Meningkatkannya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	Miliar rupiah	5.657,88	5.657,88	0	0	0	5.657,88
	Sasaran : Meningkatkannya nilai produksi kelautan dan perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan	%	4,50	4,50	1,11	1,14	1,07	1,18
	Sasaran : Meningkatkannya tata kelola administrasi penunjang urusan pemerintah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	25	25	25	25
	Meningkatkannya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85	0	0	0	85



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.958.337.000,-	Rp. 12.730.556.000,-	APBD Kab.
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 342.358.000,-	Rp. 342.358.000,-	APBD Kab.
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.091.750.400,-	Rp. 1.263.719.400,-	APBD Kab.
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 2.070.952.600,-	Rp. 2.374.753.600,-	APBD Kab.
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Rp. 38.531.000,-	Rp. 38.531.000,-	APBD Kab.
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 65.243.000,-	Rp. 69.055.000,-	APBD Kab.
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 82.043.000,-	Rp. 82.043.000,-	APBD Kab.
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 46.656.000,-	Rp. 46.656.000,-	APBD Kab.
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 16.464.000,-	Rp. 16.464.000,-	APBD Kab.
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 9.727.892.000,-	Rp. 9.779.565.000,-	APBD Kab.
11.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.775.793.000,-	Rp. 2.852.649.000,-	APBD Kab.
12.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.713.941.000,-	Rp. 3.092.215.000,-	APBD Kab.
13.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 53.456.000,-	Rp. 53.456.000,-	APBD Kab.
14.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 387.464.000,-	Rp. 383.464.000,-	APBD Kab.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kelautandan Perikanan
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.
NIP. 19730201 199311 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 3 : PENGHARGAAN

DATA PRESTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
(PENGHARGAAN SEBAGAI SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI)



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 600.A.1 / 491 TAHUN 2023

TENTANG

SEKOLAH ADIWIYATA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Akhir Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Kebumen Tahun 2023, Nomor: 010/BA-AD/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI KEBUMEN,



2023 401

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 600.4.1 / 401 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
A.	TINGKAT SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH	
1.	Sekolah Dasar Negeri 1 Donorojo	Dukuh Kalimandi, RT 001 RW 002, Desa Donorojo, Kecamatan Sempor
2.	Sekolah Dasar Negeri 1 Wonorejo	Dukuh Bodeh Wetan, RT 003 RW 001, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar
3.	Sekolah Dasar Negeri 1 Jladri	Dukuh Jladri Tengah, RT 002 RW 002, Desa Jladri, Kecamatan Buayan
4.	Sekolah Dasar Negeri Tegalretno	Dukuh Ubil, RT 002 RW 002, Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan
5.	Sekolah Dasar Negeri Menganti	Jalan Pondok Lirap, RT 001 RW 004, Desa Menganti, Kecamatan Sruweng
6.	Sekolah Dasar Negeri Panjatan	Jalan Revolusi Nomor 211, Kelurahan Panjatan, Kecamatan Karanganyar
7.	Sekolah Dasar Negeri 2 Sidogede	Dukuh Pesayangan, RT 004 RW 001, Desa Sidogede, Kecamatan Prembun
8.	Sekolah Dasar Negeri Gesikan	Dukuh Sabrangbalong, RT 003 RW 001, Desa Gesikan, Kecamatan Kebumen
9.	Sekolah Dasar Negeri 2 Logede	Dukuh Krajan, RT 002 RW 005, Desa Logede, Kecamatan Pejagoan
B.	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH	
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren	Jalan Kedungbener, Desa Bocor, Kecamatan Kebumen
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun	Jalan Stasiun Nomor 06, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsembung	Desa Plumbon, Kecamatan Karangsembung

BUPATI KEBUMEN,





BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI DONOROJO

Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Anif Suglyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660-1 / 4560-1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI 1 WONOREJO
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Arif Sugiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI 1 JLADRI

Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Arif Sugiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI TEGALRETNO

Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Arif Sugiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI 1 MENGANTI

Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Anf Suglyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI PANJATAN

Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Anif Sugiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI 2 SIDOGEDE
Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Art Sugiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI GESIKAN

Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Art. Sugiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SD NEGERI 2 LOGEDE

Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Arif Sugiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SMP NEGERI 1 BULUSPESANTREN
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Arif Sudiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SMP NEGERI 1 KUTOWINANGUN
Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Arit Sugiyanto



BUPATI KEBUMEN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 660.1 / 4560.1

Bupati Kebumen dengan ini memberikan penghargaan kepada :

SMP NEGERI 2 KARANGSAMBUNG
Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen

Dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 600.4.1/491 Tanggal 17 November 2023
tentang

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023
Berlaku sampai dengan Desember 2027



Kebumen, 14 Desember 2023
Bupati Kebumen,

Anif Sugiyanto

LAMPIRAN 4 : TABEL KINERJA TAHUN 2023

PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI IKAN YANG DIDARATKAN DI TPI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 - 2023

NO	TAHUN	VOL (Kg)	NILAI (Rp.)
1	2012	3.264.538,56	45.704.675.648
2	2013	1.733.609,00	57.302.530.077
3	2014	6.856.887,43	53.649.259.553
4	2015	4.087.465,04	78.962.820.611
5	2016	870.893,09	45.493.076.278
6	2017	4.655.432,15	66.734.969.285
7	2018	16.903.447,02	93.073.615.849
8	2019	3.790.400,19	114.997.725.658
9	2020	1.560.547,59	108.835.290.491
10	2021	2.197.176,65	93.963.681.746
11	2022	2.609.726,90	48.281.813.646
12	2023	6.369.444,09	76.858.620.755

DATA PRODUKSI IKAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012-2023

PRODUKSI PERIKANAN SECARA KESELURUHAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 - 2023

NO	TAHUN	PERIKANAN TANGKAP		PERIKANAN BUDIDAYA				USAHA PERIKANAN					
				IKAN KONSUMSI		BENIH IKAN		OLAHAN IKAN		GARAM		AKI (kg/kap/th)	
		VOL (Kg)	NILAI (Rp.)	VOL (Kg)	NILAI (Rp.)	VOL (Ek.)	NILAI (Rp.)	VOL (Kg)	NILAI (Rp.)	VOL (Kg)	NILAI (Rp.)	NILAI	
1	2012	5.138.000,00	75.913.504.000	658.248,30	10.130.391.720	13.034.874	5.011.972.850	-	-	-	-	-	-
2	2013	3.188.463,60	81.628.361.727	806.240,30	12.624.708.990	15.907.750	5.280.627.760	-	-	-	-	-	-
3	2014	8.423.093,00	78.474.964.364	1.011.838,84	21.687.637.605	17.185.082	5.809.409.900	-	-	-	-	-	-
4	2015	7.598.465,04	85.789.847.661	2.008.731,38	87.384.086.126	20.561.157	5.186.647.400	-	-	-	-	-	-
5	2016	5.585.094,00	121.345.095.660	2.221.169,00	106.472.550.000	22.095.065	6.337.089.750	-	-	-	-	15,10	
6	2017	9.068.456,45	128.210.826.243	2.572.560,00	120.003.377.200	26.740.000	6.130.017.450	247.357,00	9.014.089.940	-	-	19,63	30,00%
7	2018	17.987.363,63	110.051.417.462	2.612.062,00	157.296.566.678	28.881.911	4.644.961.720	257.450,00	9.912.603.500	12.170,00	57.807.500	21,12	7,59%
8	2019	8.915.800,00	208.409.454.306	2.852.371,00	117.603.172.000	32.851.300	6.116.988.025	283.380,00	10.141.695.000	61.215,00	244.860.000	22,17	4,97%
9	2020	9.068.530,00	196.258.500.419	3.139.317,00	130.669.387.000	36.819.564	7.062.469.235	288.066,00	6.464.341.000	144.620,00	578.480.000	22,46	1,31%
10	2021	9.646.661,67	212.457.910.669	3.220.874,00	135.191.978.000	37.188.200	6.945.022.090	452.173,00	29.218.550.300	155.945,00	623.780.000	24,54	9,26%
11	2022	9.138.317,30	173.982.608.774	3.355.110,00	138.501.573.000	35.472.907	7.083.287.700	722.690,29	37.715.056.339	136.265,00	599.757.500	27,19	10,80%
12	2023	12.898.015,49	176.664.480.191	3.453.930,00	152.416.467.300	33.326.739	7.370.000.000	526.588,65	34.486.245.497	97.448,00	374.274.300	22,33	-17,87%

**DAFTAR BANK SAMPAH DAN TPS 3R
KABUPATEN KEBUMEN PER TAHUN 2023**

No.	Nama Bank Sampah	Desa	Kecamatan
1	Bank Sampah Desa Jatijajar	Desa Jatijajar	Ayah
2	TPS 3R Berdikari	Desa Demangsari	Ayah
3	Bank Sampah Pawitan	Desa Demangsari	Ayah
4	Bank Sampah Resik Bersatu	Desa Sрати	Ayah
5	Bank Sampah Desa Bulurejo	Desa Bulurejo	Ayah
6	Bank Sampah Karya Bersama	Desa Karangbolong	Buayan
7	Bank Sampah Kenanga	Desa Rogodadi	Buayan
8	Bank Sampah Langgeng Mukti Rahayu	Desa Jatiroto	Buayan
9	Bank Sampah Semampir Gemes	Desa Semampir	Buayan
10	Bank Sampah Darlink Berseri	Desa Purbowangi	Buayan
11	Bank Sampah Tunas Karya Mukti	Desa Rangkah	Buayan
12	Bank Sampah Runtah Berkah	Desa Nampudadi	Petanahan
13	Bank Sampah KARINA	Desa Karangduwur	Petanahan
14	Bank Sampah GARASI BerAKSI	Desa Ampelsari	Petanahan
15	Bank Sampah Sari Uwuh	Desa Kewangunan	Petanahan
16	Bank Sampah Cikrak	Desa Jatimulyo	Petanahan
17	Bank Sampah Srikandi	Desa Tresnorejo	Petanahan
18	Bank Sampah Resik Kemrisik	Desa Tresnorejo	Petanahan
19	Bank Sampah Berkah Lestari	Desa Tresnorejo	Petanahan
20	Bank Sampah Medogaten Lestari	Desa Tanjungsari	Petanahan
21	Bank Sampah Sejahtera	Desa Jogomertan	Petanahan
22	Bank Sampah Resik Bareng	Desa Karangreja	Petanahan
23	Bank Sampah Margo Asri	Desa Kebonsari	Petanahan
24	Bank Sampah Tegong Migunani	Desa Banjarwinangun	Petanahan
25	Bank Sampah Harapan	Desa Banjarwinangun	Petanahan
26	Bank Sampah Kritig Berseri	Desa Kritig	Petanahan
27	Bank Sampah Si Hatin	Desa Klegenwonosari	Klirong
28	Bank Sampah Gambreng Garden	Desa Gebangsari	Klirong
29	Bank Sampah Berkah Barokah	Desa Karangglonggong	Klirong
30	Bank sampah Berkah Resik	Desa Kaliwungu	Klirong
31	Bank Sampah Jogo Resik	Desa Jogosimo	Klirong
32	Bank Sampah Mekarjaya	Desa Ranterejo	Klirong
33	Bank Sampah Jeruk Agung	Desa Jerukagung	Klirong
34	Bank Sampah Podoluhur	Desa Podoluhur	Klirong
35	Bank Sampah Trash Cleaning Squit	Desa Tambakprogaten	Klirong
36	Bank Sampah Mekar	Desa Keadongan	Klirong
37	Bank Sampah Sejati	Desa Jatimalang	Klirong
38	Bank Sampah Berisi	Desa Jatimalang	Klirong
39	Bank Sampah Agung Jaya Uwuh	Desa Tambak Agung	Klirong
40	Bank Sampah Bangkit	Desa Bumiharjo	Klirong
41	Bank Sampah Berkah Mulyo	Desa Bendogarap	Klirong
42	Bank Sampah Pengki Berkah	Desa Gadungrejo	Klirong
43	Bank Sampah Nabung Uwuh	Desa Dorowati	Klirong
44	Bank Sampah Mandiri	Desa Banjurmukadan	Buluspesantren
45	Bank Sampah Bumiku Hijau	Desa Indrosari	Buluspesantren
46	Bank Sampah Amanah	Desa Arjowinangun	Buluspesantren
47	Bank Sampah Berkah Sampah	Desa Banjurpasar	Buluspesantren
48	Bank Sampah Nurul Iman	Desa Ayamputih	Buluspesantren
49	Bank Sampah Madu Resik	Desa Maduretno	Buluspesantren
50	Bank Sampah Kurma	Desa Ampih	Buluspesantren

No.	Nama Bank Sampah	Desa	Kecamatan
51	Bank Sampah Si Binar	Desa Sidomoro	Buluspesantren
52	Bank Sampah Sari Resik	Desa Ambalkumolo	Buluspesantren
53	Bank Sampah Jalita	Desa Tanjungrejo	Buluspesantren
54	Bank Sampah Samiun gl	Desa Gondanglegi	Ambal
55	Bank Sampah Berkah Bathi Mulyo	Desa Kradenan	Ambal
56	Bank Sampah Sehat Sejahtera	Desa Prasutan	Ambal
57	Bank Sampah Kunci Mekar	Desa Kaibon	Ambal
58	Bank Sampah Rejeki Limbah Nusantara	Desa Surobayan	Ambal
59	Bank Sampah Maju Lancar	Desa Ambalresmi	Ambal
60	Bank Sampah Lumaksono	Desa Peneket	Ambal
61	Bank Sampah Uwuh Berkah	Desa Ambarwinangun	Ambal
62	Bank Sampah Mukti Bersama	Desa Sidomukti	Ambal
63	Bank Sampah Sapu Jagad	Desa Kenoyojayan	Ambal
64	Bank Sampah Harapan Jaya	Desa Lajer	Ambal
65	Bank Sampah Mandiri Sampah	Desa Singosari	Ambal
66	Bank Sampah Bina Karya	Desa Benerwetan	Ambal
67	Bank Sampah Bhakti Eling	Desa Singoyudan	Mirit
68	Bank Sampah Amanah	Desa Mangunranan	Mirit
69	Bank Sampah Junjung Uwuh	Desa Winong	Mirit
70	Bank Sampah Rowo Indah	Desa Rowo	Mirit
71	Bank Sampah Mulya Berseri	Desa Patukgawemulyo	Mirit
72	Bank Sampah Sidomakmur	Desa Mirit Petikusan	Mirit
73	Bank Sampah Sawir	Desa Wirogaten	Mirit
74	Bank Sampah Telaga Tumpuk	Desa Bonjoklor	Bonorowo
75	Bank Sampah Srikandi	Desa Ngasinan	Bonorowo
76	Bank Sampah Melati	Desa Pujodadi	Bonorowo
77	Bank Sampah Waras Waris	Desa Bonorowo	Bonorowo
78	Bank Sampah Rindu Alam	Desa Bonjoklor	Bonorowo
79	Bank Sampah Srikandi	Desa Mrentul	Bonorowo
80	Bank Sampah Manunggal Jaya	Desa Patukrejo	Bonorowo
81	Bank Sampah Walik Sakti	Desa Tersobo	Prembun
82	Bank Sampah Berkah Limbah	Desa Kedungbulus	Prembun
83	Bank Sampah Berseri	Desa Kedungwaru	Prembun
84	Bank Sampah Desa Tunggalroso	Desa Tunggalroso	Prembun
85	Bank Sampah Desa Kabuaran	Desa Kabuaran	Prembun
86	Bank Sampah Desa Sidogede	Desa Sidogede	Prembun
87	Bank Sampah Desa Pesuningan	Desa Pesuningan	Prembun
88	Bank Sampah Berkah Sampah Kemprenng Jaya	Desa Sembirkadipaten	Prembun
89	Bank Sampah Desa Hijau	Desa Merden	Padureso
90	Bank Sampah Balingasal	Desa Balingasal	Padureso
91	Bank Sampah Pejengkolan	Desa Pejengkolan	Padureso
92	TPS 3R Padureso	Desa Padureso	Padureso
93	Bank Sampah Tumpak	Desa Ungaran	Kutowinangun
94	Bank Sampah Berkah Mulia	Desa Triwarno	Kutowinangun
95	Bank Sampah Jagadresik	Desa Pejagatan	Kutowinangun
96	Bank Sampah Bedjo Lestari	Desa Kuwarisan	Kutowinangun
97	Bank Sampah Resik	Desa Jlegiwinangun	Kutowinangun
98	Bank Sampah Sakti	Desa Kalirancang	Alian
99	Bank Sampah Makmur	Desa Kemangguan	Alian
100	Bank Sampah Mulya Pesona	Desa Jatimulyo	Alian
101	Bank Sampah Turah Berkah	Desa Sawangan	Alian
102	Bank Sampah Megah Karya	Desa Krakal	Alian

No.	Nama Bank Sampah	Desa	Kecamatan
103	Bank Sampah Berkah Sari	Desa Kambang Sari	Alian
104	Bank Sampah Sadar Asri	Desa Surotrunan	Alian
105	Bank Sampah Moja Maju	Desa Surotrunan	Alian
106	Bank Sampah Berseri	Desa Surotrunan	Alian
107	Bank Sampah Beruang Berkah	Desa Bojongsari	Alian
108	Bank Sampah Bakso	Desa Poncowarno	Poncowarno
109	Bank Sampah Desa Tegalrejo	Desa Tegalrejo	Poncowarno
110	Bank Sampah Desa Jatipurus	Desa Jatipurus	Poncowarno
111	Bank Sampah Gunung Lender	Desa Karangtengah	Poncowarno
112	Bank Sampah Desa Soka	Desa Soka	Poncowarno
113	Bank Sampah Desa Blater	Desa Blater	Poncowarno
114	Bank Sampah Es Bening	Kelurahan Panjer	Kebumen
115	Bank Sampah Asri	Kelurahan Tamanwinangun	Kebumen
116	Bank Sampah Lumbung Uwuh	Kelurahan Bumirejo	Kebumen
117	Bank Sampah Kenanga Barokah	Kelurahan Panjer	Kebumen
118	Bank Sampah Limbah Berkah	Kelurahan Selang	Kebumen
119	Bank Sampah Samiun	Kelurahan Kebumen	Kebumen
120	Bank Sampah Rukun Asri	Desa Kembaran	Kebumen
121	Bank Sampah Berseri Tamanwinangun	Kelurahan Tamanwinangun	Kebumen
122	Bank Sampah Perum Mahardika Selang	Kelurahan Selang	Kebumen
123	Bank Sampah Berkah Candi	Desa Candimulyo	Kebumen
124	Bank Sampah Murti Asri	Desa Murtirejo	Kebumen
125	Bank Sampah Berkah Bersama	Desa Roworejo	Kebumen
126	Bank Sampah Anggrek	Desa Kalijirek	Kebumen
127	Bank Sampah Pancuran Indah	Desa Jemur	Kebumen
128	Bank Sampah Neo Limbersel	Kelurahan Selang	Kebumen
129	Bank Sampah Hijau Berseri	Desa Karang Sari	Kebumen
130	Bank Sampah Sari Rejeki	Desa Karang Sari	Kebumen
131	Bank Sampah Sari Reged	Desa Jatisari	Kebumen
132	Bank Sampah Margopeni	Desa Argopeni	Kebumen
133	TPS 3R Desa Kembaran	Desa Kembaran	Kebumen
134	TPS 3R Limbah Berkah Selang	Kelurahan Selang	Kebumen
135	TPS 3R MAPAN	Desa Karang Sari	Kebumen
136	TPS 3R Berkah	Kelurahan Panjer	Kebumen
137	TPS 3R Tamanwinangun	Kelurahan Tamanwinangun	Kebumen
138	TPS 3R Desa Muktisari	Desa Muktisari	Kebumen
139	TPS 3R Bengawan Bersih	Desa Kutosari	Kebumen
140	Bank Sampah Brayon Maju	Desa Pejagoan	Pejagoan
141	Bank Sampah Gemi Uwuh	Desa Kebulusan	Pejagoan
142	Bank Sampah Jalita	Desa Aditirto	Pejagoan
143	Bank Sampah Ngudi Berkah	Desa Peniron	Pejagoan
144	Bank Sampah Sumber Rejeki	Desa Pejagoan	Pejagoan
145	Bank Sampah Perum Pejagoan Indah	Desa Pejagoan	Pejagoan
146	Bank Sampah Ben Nabung'H	Desa Logede	Pejagoan
147	Bank Sampah Ling-sih	Desa Kebagoran	Pejagoan
148	Bank Sampah Pelita Pertiwi	Desa Sidoagung	Sruweng
149	Bank Sampah Untung	Desa Pakuran	Sruweng
150	Bank Sampah Tunas Indah	Desa Trikarso	Sruweng
151	Bank Sampah Sumber Rejeki	Desa Menganti	Sruweng
152	Bank Sampah Sido Berkah	Desa Sidoharjo	Sruweng
153	Bank Sampah Sumber Mulya	Desa Pengempon	Sruweng
154	Bank Sampah Desa Tanggeran	Desa Tanggeran	Sruweng

No.	Nama Bank Sampah	Desa	Kecamatan
155	TPS 3R Lestari	Desa Tanggeran	Sruweng
156	Bank Sampah Asha Agha Lestari	Desa Klepusanggar	Sruweng
157	Bank Sampah Sawunggalih	Desa Krandegan	Puring
158	Bank Sampah Runtah Makmur	Desa Sitiadi	Puring
159	Bank Sampah Berkah Jaya	Desa Puliharjo	Puring
160	Bank Sampah Sumber Rejeki	Desa Srusuh Jurutengah	Puring
161	Bank Sampah Resik Becik	Desa Bendungan	Kuwarasan
162	Bank Sampah Sari resik	Desa Tambaksari	Kuwarasan
163	Bank Sampah Pandhawa	Desa Kalipurwo	Kuwarasan
164	Bank Sampah Sido Raharjo	Desa Sidomukti	Kuwarasan
165	Bank Sampah Madu Jaya	Desa Madureso	Kuwarasan
166	Bank Sampah bumi Lestari	Desa Lemahduwur	Kuwarasan
167	Bank Sampah Jatimulyo	Desa Jatimulyo	Kuwarasan
168	Bank Sampah Gandusari	Desa Gandusari	Kuwarasan
169	Bank Sampah Pelung kuwu	Desa Kuwarasan	Kuwarasan
170	Bank Sampah Mulya Sari	Desa Kamulyan	Kuwarasan
171	Bank Sampah Berkah Jaya	Desa Kretek	Rowokele
172	Bank Sampah Bumi Asri	Desa Wagirpandan	Rowokele
173	Bank Sampah Jati Lestari	Desa Jatiluhur	Rowokele
174	Bank Sampah Tunas Rejeki	Desa Pringtutul	Rowokele
175	Bank Sampah SEHATI	Desa Rowokele	Rowokele
176	Bank Sampah BERSAHAJA	Desa Bejiryung	Sempor
177	Bank Sampah Berkah Lestari	Desa Semali	Sempor
178	Bank Sampah Mutiara Berkah	Desa Pekuncen	Sempor
179	Bank Sampah Jumantik	Desa Sempor	Sempor
180	Bank Sampah Wunut Lestari	Desa Tunjungseto	Sempor
181	Bank Sampah Desa Bonosari	Desa Bonosari	Sempor
182	Bank Sampah Desa Kenteng	Desa Kenteng	Sempor
183	Bank Sampah Desa Kedungwringin	Desa Kedungwringin	Sempor
184	TPS 3R Desa Kalibeji	Kalibeji	Sempor
185	TPS 3R Desa Selokerto	Desa Selokerto	Sempor
186	Bank Sampah Manunggal Barokah	Desa Panjangsari	Gombang
187	Bank Sampah Wonosigro	Desa Wonosigro	Gombang
188	Bank Sampah Desa Wero Gombang	Desa Wero	Gombang
189	Bank Sampah Desa Sidayu Gombang	Desa Sidayu	Gombang
190	Bank Sampah WANI	Kelurahan Wonokriyo	Gombang
191	Bank Sampah Mitra	Kedungpuji	Gombang
192	TPS 3R Selis	Kedungpuji	Gombang
193	TPS 3R Go Green	Semanding	Gombang
194	Bank Sampah Sehat Amanah	Kelurahan Panjatan	Karanganyar
195	Bank Sampah Bj Amigo	Desa Wonorejo	Karanganyar
196	Bank Sampah Sari	Desa Sidomulyo	Karanganyar
197	Bank Sampah Desa Wonorejo	Desa Wonorejo	Karanganyar
198	Bank Sampah Berkah Lestari Alam	Kelurahan Karanganyar	Karanganyar
199	TPS 3R Desa Pohkumbang	Desa Pohkumbang	Karanganyar
200	TPS 3R Desa Karangemiri	Desa Karangemiri	Karanganyar
201	TPS 3R Desa Grenggeng	Desa Grenggeng	Karanganyar
202	TPS 3R Desa Wonorejo	Desa Wonorejo	Karanganyar
203	Bank Sampah Berkah Lestari	Desa Kalirejo	Karanggayam
204	Bank Sampah Desa Pagebangan	Desa Pagebangan	Karanggayam
205	TPS 3R Peduli Lingkungan Bersih	Desa Kebakalan	Karanggayam
206	TPS 3R Karanggayam	Desa Karanggayam	Karanggayam

No.	Nama Bank Sampah	Desa	Kecamatan
207	Bank Sampah Maja Asri	Desa Karangmaja	Karanggayam
208	Bank Sampah Berkah Lestari	Desa Karangmaja	Karanggayam
209	Bank Sampah Alam Lestari	Desa Logandu	Karanggayam
210	Bank Sampah Desa Wonotirto	Desa Wonotirto	Karanggayam
211	Bank Sampah Desa Giritirto	Desa Giritirto	Karanggayam
212	Bank Sampah Sumber Rejeki	Desa Kalibening	Karanggayam
213	Bank Sampah Bersemi	Desa Kedungwaru	Karanggayam
214	Bank Sampah Desa Banioro	Desa Banioro	Karangsambung
215	Bank Sampah Desa Seling	Desa Seling	Karangsambung
216	Bank Sampah Resik	Desa Widoro	Karangsambung
217	Bank Sampah Desa Kedungwaru	Desa Kedungwaru	Karangsambung
218	TPS 3R Lukulo	Desa Karangsambung	Karangsambung
219	Bank Sampah Larangan Green Lestari	Desa Pucangan	Sadang
220	Bank Sampah Resik	Desa Seboro	Sadang
221	Bank Sampah Sido Lestari	Desa Wonosari	Sadang
222	Bank Sampah Desa Sadangwetan	Desa Sadangwetan	Sadang
223	Bank Sampah May Darling	Desa Kedunggong	Sadang
224	Bank Sampah Mandiri Sejati	Desa Cangkring	Sadang
225	TPS 3R Hanggawangsa	Desa Sadangkulon	Sadang
226	Bank Sampah Bunda Delima	Desa Temanggal	Adimulyo
227	Bank Sampah Manfangati	Desa Candiwulan	Adimulyo
228	Bank Sampah Sadar Asri	Desa Meles	Adimulyo
229	Bank Sampah Arta Resik Utama	Desa Pekuwon	Adimulyo
230	Bank Sampah Resik Mulyo	Desa Sidomulyo	Adimulyo



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Arungbinang Nomor 21 Kebumen, Kode Pos 54311,

Telepon: (0287) 381245, Faksimile 0287 381245,

Laman <https://dlhkp.kebumenkab.go.id>, Pos-el dlhkpkebumen@gmail.com

**DATA PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa	Pemrakarsa	
1		2	3	4	5	6	
1	2016	Desa Kembaran	Kec. Kebumen	No. 1 Tahun 2016 / 16 Mei 2016	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen	
2		Desa Tambakagung	Kec. Klirong	No. 4 Tahun 2016 / 17 Mei 2016	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen	
3	2017	Desa Adikarso	Kec. Kebumen	No. 2 Tahun 2017 / 15 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
4		Desa Karangsari	Kec. Kebumen	No. 8 Tahun 2017/ 15 Juli 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
5		Desa Jatimalang	Kec. Klirong	No. 9 Tahun 2017 / 23 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
6		Desa Tanggulangin	Kec. Klirong	No. 3 Tahun 2017 / 28 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
7		Desa Kemangguan	Kec. Alian	No. 9 Tahun 2017 / 13 September 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
8		Desa Kaliputih	Kec. Alian	No. 4 Tahun 2017 / 7 September 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
9		Desa Purbowangi	Kec. Buayan	No. 5 Tahun 2017 / 25 September 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
10		Desa Sikayu	Kec. Buayan	No. 6 Tahun 2017 / 5 Oktober 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
11		Desa Pasir	Kec. Ayah	No. 3 Tahun 2017 / 21 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
12		Desa Kalipoh	Kec. Ayah	No. 6 Tahun 2017 / 24 Agustus 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
13		Desa Ampelsari	Kec. Petanahan	No. 05 Tahun 2017 / 30 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
14		Desa Kewayuhan	Kec. Pejagoan	No. 04 Tahun 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
15		Desa Kalitengah	Kec. Gombang	No. 05 Tahun 2017 / 8 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
16		Desa Babadsari	Kec. Kutowinangun	No. 05 Tahun 2017 / 18 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
17		Desa Selokerto	Kec. Sempor	No. 06 Tahun 2017 / November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
18		Desa Surejan	Kec. Puring	No. 16 Tahun 2017 / 6 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
19		Desa Sidoagung	Kec. Sruweng	No. 07 Tahun 2017 / 27 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
20		Desa Sidomukti	Kec. Ambal	No. 07 Tahun 2017 / 15 Desember 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
21		Desa Adiluhur	Kec. Adimulyo	No. 09 Tahun 2017 / 8 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
22		Desa Jembangan	Kec. Poncowarno	No. 06 Tahun 2017 / 29 November 2017	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
23		2018	Desa Wagirpandan	Kec. Rowokele	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
24			Desa Lembupurwo	Kec. Mirit	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
25	Desa Seling		Kec. Karangsembung	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
26	Desa Karanggayam		Kec. Karanggayam	Tahun 2018	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
27	2019	Desa Ayamputih	Kec. Buluspesantren	No. 8 Tahun 2019/ 18 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
28		Desa Maduretno	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 3 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
29		Desa Tanjungsari	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 6 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
30		Desa Rantewringin	Kec. Buluspesantren	No. 5 Tahun 2019 / 6 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
31		Desa Balingasal	Kec. Padureso	No. 6 Tahun 2019/ 4 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
32		Desa Padureso	Kec. Padureso	No. 8 Tahun 2019 / 16 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
33		Desa Sidomukti	Kec. Kuwarasan	No. 5 Tahun 2019 / 3 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	
34		Desa Lemahduwur	Kec. Kuwarasan	No. 8 Tahun 2019 / 7 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen	

No.	Tahun	Nama Desa	Kecamatan	Nomor/Tanggal	Peraturan Desa	Pemrakarsa
1		2	3	4	5	6
35		Desa Serut	Kec. Kuwarasan	No. 3 Tahun 2019 / Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
36		Desa Bendungan	Kec. Kuwarasan	No. 7 Tahun 2019 / 18 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
37		Desa Seboro	Kec. Sadang	No. 3 Tahun 2019 / 5 April 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Pemdes Seboro
38		Desa Rahayu	Kec. Padureso	No. 11 Tahun 2019 / 23 Desember 2019	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Pemdes Rahayu
39	2020	Desa Kalirancang	Kec. Alian	No. 8 Tahun 2020/ 21 Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
40		Desa Kenoyojayan	Kec. Ambal	No. 16 Tahun 2020/ Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
41		Desa Logede	Kec. Pejagoan	No. 9 Tahun 2020/ 27 November 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
42		Desa Candiwulan	Kec. Adimulyo	No. 9 Tahun 2020/ 22 Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
43		Desa Argopeni	Kec. Ayah	No. 6 Tahun 2020/ 15 Oktober 2020	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
44	2021	Desa Karang Tengah	Kec. Poncowarno	No. 5 Tahun 2021/ Maret 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
45		Desa Pujotirto	Kec. Karangsembung	No. 7 Tahun 2021/ 15 September 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
46		Desa Grenggeng	Kec. Karanganyar	No. 5 Tahun 2021/ 25 Oktober 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
47		Desa Pakuran	Kec. Sruweng	No. 4 Tahun 2021/ 06 Oktober 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
48		Desa Tanjungsari	Kec. Petanahan	No. 5 Tahun 2021/ Juli 2021	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Disperkim LH Kab. Kebumen
49	2022	Desa Sidomulyo	Kec. Petanahan	No. 4 Tahun 2022/ 11 Oktober 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
50		Desa Podourip	Kec. Petanahan	No. 5 Tahun 2022/ 23 Agustus 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
51		Desa Sadangkulon	Kec. Sadang	No. 3 Tahun 2022/ 11 Agustus 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
52		Desa Wonosari	Kec. Sadang	No. 3 Tahun 2022/ 11 Agustus 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
53		Desa Glontor	Kec. Karanggayam	No. 7 Tahun 2022/ 10 November 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
54		Desa Kebakalan	Kec. Karanggayam	No. 4 Tahun 2022/ 19 Juli 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
55		Desa Kutowinangun	Kec. Kutowinangun	No. 8 Tahun 2022/ 30 November 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
56		Desa Tunjungseto	Kec. Kutowinangun	No. 2 Tahun 2022/ 21 Juli 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
57		Desa Temanggal	Kec. Adimulyo	No. 10 Tahun 2022/ 10 Oktober 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
58		Desa Candimulyo	Kec. Kebumen	No. 4 Tahun 2022/ 14 Oktober 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
59		Desa Sendangdalem	Kec. Padureso	No. 5 Tahun 2022/ 18 Oktober 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
60		Desa Bojongsari	Kec. Alian	No. 2 Tahun 2022/ 16 Agustus 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
61		Desa Banioro	Kec. Karangsembung	No. 7 Tahun 2022/ 28 Mei 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
62		Desa Karangsembung	Kec. Karangsembung	No. 4 Tahun 2022/ 21 April 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
63		Desa Jatimulyo	Kec. Petanahan	No. 4 Tahun 2022/ 27 April 2022	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	Pemdes Jatimulyo
64	2023	Desa Bagung	Kec. Prembun	No. 4 Tahun 2023/ 28 Juni 2023	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
65		Desa Banjarsari	Kec. Gombang	No. 2 Tahun 2023/ 27 Juli 2023	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
66		Desa Giyanti	Kec. Rowokele	No. 4 Tahun 2023/ 8 September 2023	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
67		Desa Gondanglegi	Kec. Ambal	No. 4 Tahun 2023/ 27 Juli 2023	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
68		Desa Jatimulyo	Kec. Alian	No. 4 Tahun 2023/ 7 Juli 2023	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
69		Desa Patemon	Kec. Gombang	No. 8 Tahun 2023/ 27 Juni 2023	Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHKP Kab. Kebumen
70		Desa Kaligending	Kec. Karangsembung		Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	DLHK Provinsi Jawa Tengah

KOMPONEN DATA DUKUNG INDEKS RESPON "LANGIT BIRU"

NO	INDIKATOR	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	Kebijakan Dan Peraturan	Target Indeks Kualitas Udara tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Sebutkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah ditetapkan terkait Target Indeks Kualitas Udara
		Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati terkait Pengendalian Pencemaran Udara	Sebutkan Dokumen Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati terkait Pengendalian Pencemaran Udara
2	Struktur Dan Pengembangan Kompetensi	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran udara dengan pegawai keseluruhan SKPD	Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran udara dibagi jumlah pegawai keseluruhan SKPD
		Rasio pegawai yang mengikuti pelatihan terkait pengendalian pencemaran udara dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran udara	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan terkait pengendalian pencemaran udara dibagi jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran udara
3	Perencanaan Kegiatan	Rasio anggaran pengendalian pencemaran udara dengan APBD	Total Anggaran Pengendalian Pencemaran Udara dari seluruh SKPD dibagi Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		Rasio anggaran pengendalian pencemaran udara dengan anggaran SKPD	Total Anggaran Pengendalian Pencemaran Udara SKPD dibagi Total Anggaran SKPD
4	Implementasi	Apakah sudah mencapai target Indeks Kualitas Udara yang ditetapkan?	Menetapkan target IKU dalam dokumen Perda/PerGub/PerWali/PerBup
		Rasio jumlah industri dan jasa (rumah sakit, hotel, kawasan industri) yang memenuhi baku mutu emisi dengan total industri dan jasa yang dipantau	Total jumlah rumah sakit yang memenuhi baku mutu emisi dibagi total jumlah rumah sakit yang dipantau Catatan: Dapat menggunakan data sekunder
			Total jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi dibagi total jumlah industri yang dipantau Catatan : Dapat Menggunakan Data Sekunder
			Total jumlah kawasan industri yang memenuhi baku mutu emisi dibagi total jumlah kawasan industri yang dipantau Catatan : Dapat Menggunakan Data Sekunder
			Total jumlah hotel yang memenuhi baku mutu emisi dibagi total jumlah hotel yang dipantau Catatan : Dapat Menggunakan Data Sekunder
		Rasio jumlah titik pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan dengan APBD dengan jumlah kawasan peruntukan (pemukiman, industri/kawasan industri, perkantoran, dan transportasi)	Total jumlah titik pemantauan kualitas udara di kawasan pemukiman dibagi total jumlah kawasan pemukiman Catatan ; Dapat Menggunakan Data Sekunder
			Total jumlah titik pemantauan kualitas udara di industri/kawasan industri dibagi total jumlah industri atau kawasan industri Catatan ; Dapat Menggunakan Data Sekunder
			Total jumlah titik pemantauan kualitas udara di kawasan perkantoran dibagi total jumlah kawasan perkantoran Catatan ; Dapat Menggunakan Data Sekunder
			Total jumlah titik pemantauan kualitas udara di kawasan transportasi protokol dibagi total jumlah kawasan transportasi jalan protokol Catatan : Dapat Menggunakan Data Sekunder
			Total jumlah titik pemantauan kualitas udara di kawasan transportasi jalan kolektor dibagi total jumlah kawasan transportasi jalan kolektor Catatan : Dapat Menggunakan Data Sekunder

NO	INDIKATOR	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		Rasio jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu dengan jumlah total kendaraan bermotor dalam wilayah administrasi kota dan administrasi ibukota Kabupaten	Total jumlah kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah total kendaraan bermotor Catatan: - Data kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu termasuk yang dilakukan oleh Dishub - Uji emisi yang dilakukan selain oleh OPD datanya dapat diperoleh melalui bengkel Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Tipe 1
		Rasio jumlah angkutan umum berbasis jalan raya terhadap total jumlah kendaraan bermotor	Total jumlah angkutan umum berbasis jalan raya dibagi jumlah total kendaraan bermotor
		Rasio panjang pedestrian yang memenuhi SNI 03-2443-1991 tentang Spesifikasi Trotoar dengan total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi kota dan administrasi ibukota Kabupaten	Total panjang pedestrian (km) yang memenuhi SNI 03-2443-1991 dengan total panjang jalan arteri/protokol* dan kolektor* di wilayah administrasi kota dan administrasi ibukota Kabupaten Catatan : berdasarkan UU no. 2 Tahun 2022 Jalan arteri/protokol: jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ibukota Kabupaten (km) Jalan kolektor: jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi
		Rasio panjang jalur sepeda dengan total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi kota dan administrasi ibukota Kabupaten	Total panjang jalur sepeda (km) dibagi total panjang jalan arteri/protokol dan kolektor di wilayah administrasi kota dan administrasi ibukota Kabupaten (km)
5	Pelibatan Pemangku Kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran udara	Sebutkan pemangku kepentingan (sektor swasta dan masyarakat) yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran udara
		Jumlah program/upaya pengendalian pencemaran udara yang melibatkan instansi lain	Sebutkan program/upaya pengendalian pencemaran udara yang melibatkan instansi lain
6	Publikasi	Menyebarkan informasi terkait status mutu udara dan upaya pengendalian pencemaran udara	Sebutkan media publikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi terkait status mutu udara dan upaya pengendalian pencemaran udara
7	Inovasi	Memiliki kegiatan dengan kriteria : dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara yang lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini; mendorong perbaikan kapabilitas pemerintah daerah dan hubungan sosial masyarakat setempat; atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik.	Sebutkan kegiatan dengan kriteria : dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara yang lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini; mendorong perbaikan kapabilitas pemerintah daerah dan hubungan sosial masyarakat setempat; atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik.

KOMPONEN DATA DUKUNG INDEKS RESPON "KALI BERSIH"

NO	INDIKATOR	SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	KEBIJAKAN DAN PERATURAN	Target Indeks Kualitas Air tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Sebutkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah ditetapkan
		Memiliki Peraturan Daerah terkait Pengendalian Pencemaran Air	Sebutkan Peraturan Daerah terkait Pengendalian Pencemaran Air
		Memiliki Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah di Sungai	Sebutkan Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah di Sungai
2	Struktur Dan Pengembangan Kompetensi	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air dengan pegawai keseluruhan SKPD	Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian pencemaran air dibagi jumlah pegawai keseluruhan SKPD
		Rasio pegawai yang mengikuti pelatihan terkait pengendalian pencemaran air dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran air	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan terkait pengendalian pengendalian pengendalian pencemaran air dibagi jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian pencemaran air
3	Perencanaan Kegiatan	Rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan APBD	Total anggaran pengendalian pencemaran air dari seluruh SKPD dibagi Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		Rasio anggaran pengendalian pencemaran air dengan anggaran SKPD	Total anggaran pengendalian pencemaran air SKPD dibagi Total Anggaran SKPD
4	Implementasi	. Apakah sudah mencapai target IKA yang ditetapkan?	Menetapkan target IKA dalam dokumen Perda/PerGub/PerWali/PerBup
		Rasio jumlah industri yang memenuhi baku mutu dengan total industri yang dipantau	Total jumlah industri yang memenuhi baku mutu dibagi total jumlah industri yang dipantau baik secara langsung maupun tidak langsung
		Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) dengan jumlah total titik pemantauan kualitas air	Total jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) dibagi jumlah total titik pemantauan kualitas air berdasarkan ketentuan Catatan: - Jumlah titik pemantauan badan air adalah penjumlahan titik pemantauan kualitas air yang dilakukan di sungai, danau, situ, dan/atau waduk - Jumlah total titik pemantauan kualitas air berdasarkan ketentuan adalah jumlah badan air yang perlu dilakukan pemantauan kualitas air dikali 3 - Paling sedikit 3 titik pada setiap badan air - Untuk sungai pada bagian hulu, hilir, dan tengah
		Rasio jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang memenuhi baku mutu air dengan jumlah total titik pemantauan kualitas air	Total jumlah titik pemantauan badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang memenuhi baku mutu air dibagi jumlah total titik pemantauan kualitas air Catatan: - Jumlah titik pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu air adalah penjumlahan titik pemantauan kualitas air dengan status mutu air "memenuhi" pada status mutu air kelas 2
		Rasio jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik dengan jumlah penduduk total	Total jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik (orang/jiwa) dibagi jumlah penduduk total (orang/jiwa) Catatan : - Jumlah penduduk terlayani IPAL domestik menggunakan sumber data Dinas PUPR - IPAL domestik termasuk IPAL Apartemen Hunian dan Kawasan Pemukiman - Jumlah penduduk terlayani IPAL Domestik (orang/jiwa) dapat menggunakan pendekatan 1 KK/1 rumah = 4 orang/jiwa

NO	INDIKATOR	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		Rasio Jumlah USK (Usaha Skala Kecil) yang mengolah limbah dibanding dengan total USK	Total jumlah USK yang mengolah limbah dibagi jumlah total USK Catatan : - Usaha Skala Kecil : Usaha dengan modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha - USK seperti Usaha Ternak, Laundry, Tahu, Tempe, Batik, Penyamakan Kulit, Pelapisan Logam, dan lain lain
		Rasio jumlah industri yang dipantau dengan total jumlah industri di wilayah Kab/Kota	Jumlah Industri yang dipantau baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah kabupaten/kota dibagi total jumlah industri di wilayah Kab/Kota
		Rasio jumlah pemantauan sampah dengan hasil nihil dengan jumlah total pemantauan sampah sungai di badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah pemantauan sampah dengan hasil nihil di badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dibagi jumlah total pemantauan sampah di badan air (sungai, danau, situ, embung, waduk) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota
		Jumlah infrastruktur penangkap sampah di sungai	
5	Pelibatan Pemangku Keperentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran air	Sebutkan pemangku kepentingan (sektor swasta dan masyarakat) yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian pencemaran air
		Jumlah program/upaya pengendalian pencemaran air yang melibatkan instansi lain	Sebutkan program/upaya pengendalian pencemaran air yang melibatkan instansi lain
6	Publikasi	Menyebarkan informasi terkait status mutu air dan upaya pengendalian pencemaran air	Sebutkan media publikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi terkait status mutu air dan upaya pengendalian pencemaran air
7	Inovasi	. Memiliki kegiatan dengan kriteria : dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran air yang lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini; mendorong perbaikan kapabilitas pemerintah daerah dan hubungan social masyarakat setempat; atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik.	Sebutkan kegiatan dengan kriteria : dapat menyelesaikan permasalahan pengendalian pencemaran air yang lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini; mendorong perbaikan kapabilitas pemerintah daerah dan hubungan social masyarakat setempat; atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik.

KOMPONEN DATA DUKUNG INDEKS RESPON "INDONESIA HIJAU"			
NO	INDIKATOR	SPEKIFIKASI	KETERANGAN
1	Kebijakan Dan Peraturan	Target Indeks Kualitas Tutupan Lahan tercantum dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Sebutkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sudah ditetapkan
		Memiliki Peraturan Daerah terkait Pengendalian Kerusakan Lahan	Sebutkan Peraturan Daerah terkait Pengendalian Kerusakan Lahan
2	Struktur Dan Pengembangan Kompetensi	Rasio pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian kerusakan lahan dengan pegawai keseluruhan SKPD	Jumlah pegawai yang ditugaskan melakukan tugas pengendalian kerusakan lahan dibagi jumlah pegawai keseluruhan SKPD
		Rasio pegawai yang mengikuti pelatihan terkait pengendalian kerusakan lahan dengan jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian kerusakan lahan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan terkait pengendalian kerusakan lahan dibagi jumlah pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengendalian kerusakan lahan
3	Perencanaan Kegiatan	Rasio anggaran pengendalian kerusakan lahan dengan APBD	Total anggaran pengendalian kerusakan lahan dari seluruh SKPD dibagi Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		Rasio anggaran pengendalian kerusakan Lahan dengan anggaran SKPD	Total anggaran pengendalian kerusakan lahan SKPD dibagi Total Anggaran SKPD
4	Implementasi	Apakah sudah mencapai target Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang ditetapkan?	Sudah/belum mencapai target indeks kualitas tutupan lahan yang ditetapkan.
		Rasio Luas Tutupan Hutan dengan total luas wilayah administrasi	Luas Tutupan Hutan (ha) dibagi total luas wilayah administrasi (ha) Catatan : Luas Tutupan Hutan dan Luas Wilayah Administrasi menggunakan data penghitungan IKL pada aplikasi IKLH
		Rasio luas kawasan lindung yang sudah ditetapkan terhadap luas kawasan lindung dalam RTRW	Rasio luas kawasan lindung yang sudah ditetapkan dibagi total luas kawasan lindung dalam RTRW. Catatan : Mengacu pada SK atau Peraturan Menteri LHK/Kepala Daerah terkait penetapan luas kawasan lindung eksisting dan total luas dan/atau rencana luas kawasan lindung dalam RTRW
		Rasio luas lahan kritis terhadap total luas wilayah administrasi	Rasio luas lahan kritis dibagi total luas wilayah administrasi Catatan : Sumber data Ditjen PDASRH - KLHK
		Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap luas wilayah administrasi	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) (ha) dibagi total luas wilayah administrasi (ha) Catatan : RTH termasuk Tahura, Taman Kehati
5	Pelibatan Pemangku Kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian kerusakan lahan	Sebutkan pemangku kepentingan (sektor swasta dan masyarakat) secara lengkap dan spesifik yang difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian kerusakan lahan
		Jumlah program/upaya pengendalian kerusakan lahan yang melibatkan instansi lain	Sebutkan program/upaya pengendalian kerusakan lahan yang melibatkan instansi lain
6	Publikasi	Menyebarkan informasi terkait Kualitas Tutupan Lahan dan upaya pengendalian kerusakan lahan	Sebutkan media publikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi terkait Kualitas Tutupan Lahan dan upaya pengendalian kerusakan lahan
7	Inovasi	Memiliki kegiatan dengan kriteria : dapat menyelesaikan permasalahan kerusakan tutupan lahan yang lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini; mendorong perbaikan kapabilitas pemerintah daerah dan hubungan social masyarakat setempat; atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik.	Sebutkan kegiatan dengan kriteria : dapat menyelesaikan permasalahan kerusakan tutupan lahan yang lebih efektif dibandingkan solusi yang ada saat ini; mendorong perbaikan kapabilitas pemerintah daerah dan hubungan social masyarakat setempat; atau pemanfaatan aset dan sumber daya yang lebih baik.